



PERUBAHAN

RENCANA STRATEGIS



DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2024 - 2026



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur kami panjatkan kepada ALLAH SWT Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga Perubahan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan untuk Baginda Nabi Muhammad SAW.

Perubahan Rencana kerja pembangunan Kelautan dan Perikanan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja, implementasi penguatan peran para *stakeholders* dalam pelaksanaan Rencana Kerja. Renstra menjadi dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, juga memberikan landasan kebijakan operasional bagi Sekretariat, seluruh Bidang, Cabang Dinas dan UPT lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, baik di jajaran struktural maupun fungsional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Renstra ini menjadi arah pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang kelautan dan perikanan, khususnya peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka menjawab isu strategis pengurangan kemiskinan, pengurangan angka pengangguran, pembangunan infrastruktur dan tata kelola pemerintahan.

Perubahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 disusun melalui berbagai tahapan yakni persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan diakhiri dengan penetapan setelah Perubahan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD. Rancangan akhir Perubahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau telah diverifikasi oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka penyelarasan akhir dengan Perubahan RPJMD dan telah diajukan kepada Kepala Daerah guna memperoleh penetapan, kemudian menjadi bagi pedoman Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dalam menyusun rancangan Rencana Kerja (Renja) setiap tahun.

Tanjungpinang, Januari 2024

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



Dr. SAID SUDRAJAD, S.Sos., M.Si
NIP. 19690504 200003 1 008



DAFTAR ISI

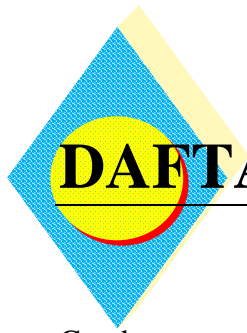
	Isi	Hal
	KATA PENGANTAR	i
	DAFTAR ISI	ii
	DAFTAR TABEL	iii
	DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I	PENDAHULUAN	I-1
	1.1. Latar Belakang	I-1
	1.2. Landasan Hukum	I-5
	1.3. Maksud dan Tujuan	I-8
	1.4. Sistematika Penulisan	I-8
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	II-1
	2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DKP Provinsi Kepulauan Riau	II-1
	2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi	II-1
	2.1.2. Struktur Organisasi	II-2
	2.1.3. Uraian Tupoksi	II-2
	2.2. Sumber Daya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau	II-13
	2.2.1. Jumlah Pegawai	II-13
	2.2.2. Analisa Kebutuhan Pegawai	II-16
	2.2.3. Sarana dan Prasarana	II-23
	2.3. Kinerja Pelayanan DKP Provinsi Kepulauan Riau	II-23
	2.3.1. Kinerja Pelayanan Sektor Kelautan Perikanan	II-23
	2.3.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan	II-28
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DKP Provinsi Kepulauan Riau	II-32
	2.4.1. Peluang	II-32
	2.4.2. Tantangan	II-33
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	III-1
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan DKP Kepulauan Riau	III-1
	3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala / Wakil Kepala Daerah Terpilih	III-4
	3.3. Telaah Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan RI	III-9
	3.4. Telaah RTRW/RZWP3K dan KLHS	III-13
	3.5. Penentuan Isu-isu strategis	III-15
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
	4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah DKP Provinsi Kepulauan Riau	IV-1
	4.1.1. Tujuan	IV-1
	4.1.2. Sasaran	IV-1
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	V-1
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	VII-1
BAB VIII	PENUTUP	VIII-1
	8.1. Kesimpulan	VIII-1
	8.2. Kaidah Pelaksanaan	VIII-1



DAFTAR TABEL



Tabel		Hal
1.1.	Luas Wilayah Daratan Provinsi Kepulauan Riau Menurut Permendagri Nomor 72 Tahun 2019	I-1
1.2.	Luas Wilayah Lautan Provinsi Kepulauan Riau Menurut Perhitungan Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal Tahun 2007	I-2
2.2.A	Rekapitulasi Jumlah Pegawai DKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023	II-14
2.2.B	Rekapitulasi Jumlah Pegawai menurut Tingkat Pendidikan & Jenis Kelamin di DKP Provinsi Kepri Tahun 2023	II-15
2.2.C	Rekapitulasi Kebutuhan Pegawai berdasarkan Beban Kerja di DKP Prov. Kepri Tahun 2023	II-16
2.2.D	Sarana dan Prasarana Penunjang Pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri	II-23
2.3.	Pencapaian Kinerja Pelayanan DKP Kepri Tahun 2016 – 2020	II-25
2.4.	Pencapaian Kinerja Pelayanan DKP Kepri Tahun 2021-2023	II-26
2.5.	Realisasi Anggaran Tahun 2021-2023	II-31
3.1.	Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau	III-2
3.2.	Identifikasi Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau	III-7
3.3.	Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Sasaran Renstra KKP Tahun 2020-2024 dan Faktor Penghambat serta Faktor Pendorong	III-11
3.4.	Pemetaan Rencana Zonasi Provinsi Kepulauan Riau	III-13
3.5.	Rumusan Rekomendasi Kebijakan Strategis KLHS RPJMD	III-15
3.6.	Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis	III-16
3.7.	Nilai Skala Kriteria	III-16
3.8.	Rata-rata Skor Isu-isu Strategis	III-17
4.1.	Sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri Tahun 2024-2026	IV-2
4.2.	Target Indikator Kinerja Kunci (Permendagri No. 18 Tahun 2020) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024-2026	IV-3
5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	V-2
6.1.	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024-2026	VI-7
7.1.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD Tahun 2024-2026	VII-5
7.2.	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD Tahun 2024-2026	VII-6



DAFTAR GAMBAR



Gambar		Hal
2.1.	Bagan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau	II-2
2.2.	Struktur Organisasi UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Pantai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau	II-10
2.3.	Struktur Organisasi UPTD BPMPPKP pada DKP Provinsi Kepulauan Riau	II-11
2.4.	Struktur Organisasi UPTD Balai Benih Ikan pada DKP Provinsi Kepulauan Riau	II-12
2.5.	Struktur Organisasi Cabang Dinas pada DKP Provinsi Kepulauan Riau	II-13

BAB I PENDAHULUAN



- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

1.1. LATAR BELAKANG

Provinsi Kepulauan Riau merupakan Provinsi ke-32 di Indonesia yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002. Provinsi Kepulauan Riau berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga. Batas-batas wilayah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Negara Vietnam dan Negara Kamboja
- Sebelah Selatan : Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Jambi
- Sebelah Barat : Negara Malaysia, Negara Singapura dan Provinsi Riau
- Sebelah Timur : Negara Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat

Secara administratif, Provinsi Kepulauan Riau memiliki 2 (dua) kota yaitu Kota Tanjungpinang sebagai ibukota Provinsi dan Kota Batam, serta memiliki 5 (lima) Kabupaten, yaitu : Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, luas daratan Provinsi Kepulauan Riau seluas 8.201,72 Km², dengan rincian sebagai berikut :

TABEL. 1.1.
LUAS WILAYAH DARATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU MENURUT
PERMENDAGRI NOMOR 72 TAHUN 2019

No	Kabupaten / Kota	Luas Daratan (km ²)
1.	Kabupaten Bintan	1.318,21
2.	Kabupaten Karimun	912,75
3.	Kabupaten Natuna	2.009,04
4.	Kabupaten Lingga	2.266,77
5.	Kabupaten Kepulauan Anambas	590,14
6.	Kota Batam	960,25
7.	Kota Tanjungpinang	144,56
	TOTAL	8.201,72

Sumber : Permendagri Nomor 72 Tahun 2019

Luas wilayah laut Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan hitungan teknis dari Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal Tahun 2007 (dengan mengabaikan batas wilayah kewenangan pengelolaan sejauh 12 mil laut), luas laut Provinsi Kepulauan Riau sebesar 417.012,97 Km². Sampai saat ini belum ada penetapan luas wilayah laut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri. Berikut ini disajikan rincian luas laut menurut kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan perhitungan Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal Tahun 2007.

TABEL 1.2.
LUAS WILAYAH LAUT PROVINSI KEPULAUAN RIAU MENURUT PERHITUNGAN
BALAI KAJIAN GEOMATIKA BAKOSURTANAL TAHUN 2007

No	Kabupaten / Kota	Luas Wilayah Laut (km ²)
1	Kabupaten Bintan	102.964,08
2	Kabupaten Karimun	4.698,09
3	Kabupaten Natuna	216.113,42
4	Kota Batam	3.675,25
5	Kota Tanjungpinang	149,13
6	Kabupaten Lingga	43.339,00
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	46.074,00
	Total	417.012,97

Sumber : Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal tahun 2007

Provinsi Kepulauan Riau dengan panjang garis pantai 8.561,33 Km. Dengan Kondisi demikian, tentunya Provinsi Kepulauan Riau menyimpan Potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar, yang terdiri dari berbagai hasil perikanan laut (perikanan tangkap dan budidaya); wisata bahari dan pantai; ekosistem mangrove; terumbu karang dan rumput laut serta beragam jenis biota laut lainnya.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 yang berisi tentang penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yaitu H. Ansar Ahmad dan Hj. Marlin Agustina. Visi dan Misi ini kemudian diterjemahkan ke dalam tujuan dan sasaran; strategi arah kebijakan dan program pembangunan daerah; kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah; serta kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Untuk mengelola potensi sumberdaya kelautan dan perikanan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah memberikan posisi yang cukup kuat dalam membangkitkan kekuatan ekonomi kelautan dan perikanan untuk kemajuan masyarakat Kepulauan Riau. Kuatnya komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dibuktikan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 dengan Visi adalah **“Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya”**, yang diwujudkan kedalam 5 (lima) misi utama pembangunan daerah. Kelima misi tersebut antara lain, sebagai berikut :

1. Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat;
2. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan;
3. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasis Iman dan Taqwa;
4. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan;
5. Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur

Misi pembangunan Kepulauan Riau diantaranya menyebutkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan, yaitu misi ke-1 : Percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis maritim dan keunggulan wilayah untuk peningkatan kemakmuran masyarakat; dengan arahan utama Kepala Daerah terpilih ke-7 yaitu : Optimalisasi Potensi Kemaritiman, Pertambangan dan Lingkungan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 ini disusun sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026, yang disusun berdasarkan Visi dan Misi pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Bapak Ansar Ahmad dan Ibu Marlin Agustina yang secara resmi dilantik pada 25 Februari 2021.

Mengingat Renstra berfungsi sebagai penjabaran RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, maka isi dan substansi dari Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan ini wajib memenuhi ketentuan sebagaimana termaktub di dalam aturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan dengan format mengacu kepada Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Mendorong Dinas Kelautan dan Perikanan untuk menyusun rencana program dan kegiatan atas sebagian dari kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau di bidang Kelautan dan Perikanan, dalam rangka mencegah duplikasi program dengan kewenangan Gubernur dibidang yang sama.
2. Mendorong Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau untuk menyusun rencana program dan kegiatan yang sesuai tugas pokok dan fungsinya, dalam rangka mencegah terjadinya duplikasi program dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah lain yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang berkaitan.

Proses dan tata cara penyusunan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 melalui beberapa alur dan tahapan yang juga memerlukan *stakeholders* di luar Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dan keterkaitan proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 dengan proses penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.

Ada 3 (tiga) alur spesifik yang ditempuh dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, yaitu :

- 1) Alur proses strategis dan teknokratis, alur ini merupakan alur teknis perencanaan, yang merupakan dominasi para perencana daerah dan pakar perencanaan daerah, alur ini ditujukan menghasilkan informasi, analisis, proyeksi, alternatif-alternatif tujuan, strategi, kebijakandan program sesuai kaidah teknis perencanaan yang diharapkan dapat memberikan masukan bagi alur proses partisipatif.
- 2) Alur proses partisipatif, alur ini merupakan alur bagi keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan daerah. Kesepakatan atas tahap-tahap penting pengambilan keputusan perencanaan seperti yang telah dilaksanakan pada Musrenbang Daerah Tahun 2021. Alur ini merupakan wahana bagi non government stakeholder untuk memberikan kontribusi yang efektif proses strategis.
- 3) Alur legislasi dan politik, ini merupakan alur proses konsultasi kepada legislatif (DPRD) Provinsi Kepri sebelum Renstra OPD ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah, pada alur ini diharapkan DPRD dapat memberikan kontribusi pemikirannya, review dan evaluasi atas hasil-hasil baik proses strategis maupun proses partisipatif.

Memasuki tahun kedua pelaksanaan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD telah dilakukan. Hasil evaluasi tersebut adalah rekomendasi untuk melakukan perubahan RPJMD. Perubahan ini secara valid memenuhi syarat pasal 342 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dapat dilakukan antara lain apabila terjadi perubahan yang mendasar yang mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional, serta memiliki sisa masa berlaku tidak kurang dari 3 (tiga) tahun.

Dalam pelaksanaan RPJMD selama 2 tahun (RKPD 2022 dan RKPD 2023), dinyatakan bahwa terdapat beberapa hal mendasar yang memerlukan perubahan dalam rangka mengoptimalkan kinerja pembangunan hingga akhir periode. Beberapa urgensi dan alasan dilakukan perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 dapat dijabarkan sebagai berikut,

1. Adanya Perubahan IKU daerah:

Dari hasil evaluasi RPJMD masih terdapat IKU yang belum merepresentasikan pencapaian atas tujuan dan sasaran, sehingga belum dapat terpenuhinya semangat efektif dan efisien dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang Kepulauan Riau. Oleh karena itu, penelaahan kembali perlu dilakukan dalam rangka memperbaiki cascading upaya pencapaian visi Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya. Perubahan ini tentu saja berdampak pada perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) pembangunan jangka menengah Kepulauan Riau termasuk di dalamnya penyesuaian target-target pembangunan mengacu pada pencapaian pembangunan saat ini. Adanya perubahan IKU daerah juga memengaruhi IKU OPD sebagaimana yang diamanatkan oleh Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 77 bahwa RPJMD menjadi pedoman Renstra dan RKPD. Penyesuaian ini akan meningkatkan kualitas hierarki pembangunan daerah dengan kinerja OPD berpotensi memiliki kontribusi optimal dalam perwujudan visi Kepulauan Riau.

2. Penyesuaian terhadap Kebijakan Nasional:

- a. Terbitnya UU nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Peraturan ini berimplikasi pada berubahnya gambaran umum keuangan daerah yang sudah dirumuskan dalam dokumen RPJMD.
- b. Surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 yang berimplikasi pada penganggaran.
- c. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Terbitnya pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur dari PMDN 90/2019 memerlukan penyesuaian dengan Program RPJMD Provinsi Kepulauan Riau.

Berkenaan dengan hal diatas. maka Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 perlu dilakukan penyesuaian dengan berpedoman pada Dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026. Dengan harapan menjadi sebuah dokumen perencanaan pembangunan Kelautan dan Perikanan di sisa tahun perencanaan dengan kondisi lebih terkini, lebih efektif sebagai acuan penyusunan rencana pembangunan tahunan, dan dapat mengakselerasi percepatan pembangunan, pemulihan ekonomi dan pencapaian target/indikator pembangunan daerah di Provinsi Kepulauan Riau.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana diubah sebanyak 3 kali, dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405); dan perubahan terakhir diubah dengan Undang-Undang No 11

- Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
 21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 01/MEN/2007 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
 22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Indikator Kinerja Utama;
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008

- tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 28. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.67/PERMEN-KP/2018 tentang Usaha Pengolahan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1883);
 29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 30. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
 31. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 32. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025;
 33. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Terumbu Karang Provinsi Kepulauan Riau;
 34. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 17);
 35. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 Rencana Tentang Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 Nomor 1).
 36. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021);
 37. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017);

38. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 442);
39. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Cabang Dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 453);
40. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 83 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Wewenang Lainnya pada Cabang Dinas Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019);
41. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan yang lebih actual dan berdasarkan isu terkini dan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau pada periode tahun 2021-2026 agar pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan dapat terlaksana secara sistematis, terarah, terpadu dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, adalah :

- 1) Untuk mewujudkan kondisi yang diinginkan yaitu ikut mendorong tercapainya sasaran pembangunan kelautan dan perikanan yang ditetapkan, sekaligus mengantisipasi dinamika dan perkembangan situasi dan kondisi dalam negeri, lingkungan strategis, dan kecenderungan global yang berubah dengan cepat;
- 2) Menyediakan pedoman dalam penyusunan program/kegiatan sisa periode perencanaan 2021-2026;
- 3) Memberikan tolak ukur kinerja sebagai bahan evaluasi kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Memuat tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DKP Provinsi Kepulauan Riau, Sumber Daya DKP Provinsi Kepulauan Riau, Kinerja Pelayanan DKP Provinsi Kepulauan Riau serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DKP Provinsi Kepulauan Riau

- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**
- Memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, telaahan Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telaahan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI dan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan penentuan isu-isu strategis.
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**
- Memuat tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**
- Memuat tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**
- Memuat tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**
- Memuat tentang penyelenggaraan tentang urusan Kelautan dan Perikanan
- BAB VIII : PENUTUP**
- Memuat tentang kesimpulan atas substansi Renstra secara menyeluruh, harapan terhadap hasil yang diinginkan serta pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU



- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumberdaya
- 2.3. Kinerja Pelayanan
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

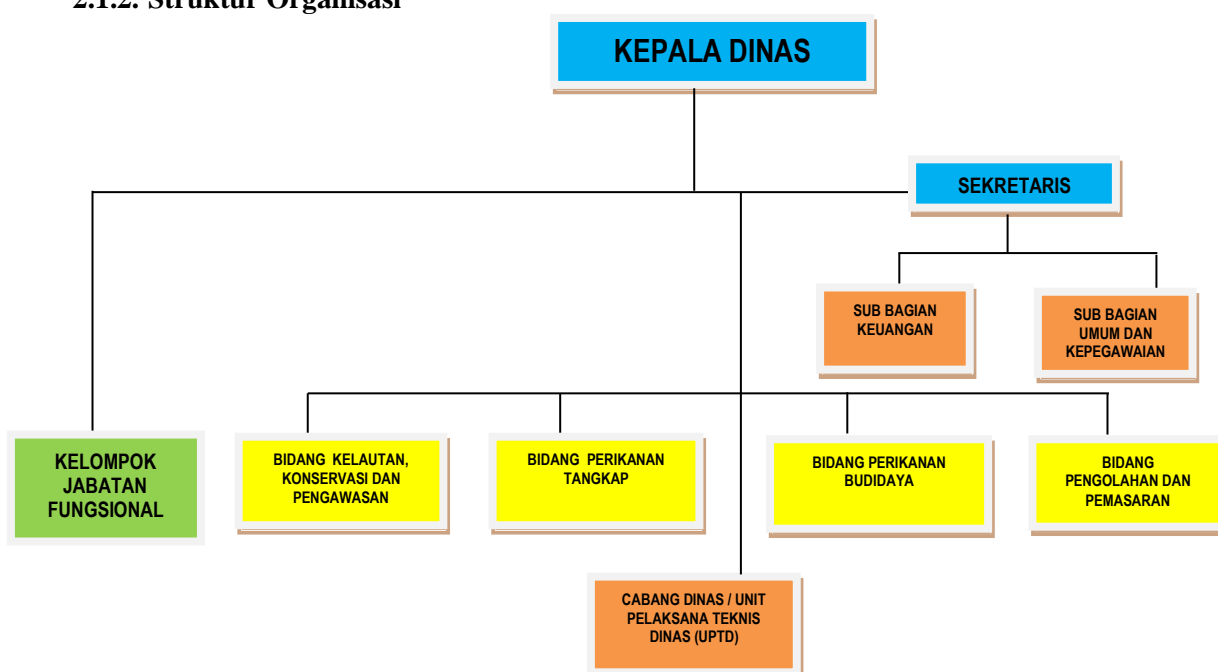
Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Tugas Dinas Kelautan Dan Perikanan, adalah : “membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi”. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau mempunyai fungsi :

- a) perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Kelautan, Konservasi dan Pengawasan, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran, Cabang Dinas Kelautan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- b) pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Kelautan, Konservasi dan Pengawasan, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran, Cabang Dinas Kelautan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Kelautan, Konservasi dan Pengawasan, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran, Cabang Dinas Kelautan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- d) pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Kelautan, Konservasi dan Pengawasan, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran, Cabang Dinas Kelautan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- e) penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
- f) pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
- g) penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
- h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau terdiri atas:

- a. Sekretariat;
 - a.1. Sub Bagian Keuangan;
 - a.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Bidang Kelautan, Konservasi dan Pengawasan;
- c. Bidang Perikanan Tangkap;
- d. Bidang Perikanan Budidaya;
- e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran;
- f. Cabang Dinas dan atau Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.2. Struktur Organisasi



Gambar 2.1. Bagan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau

2.1.3. Uraian Tupoksi

Untuk menunjang pencapaian tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau ditopang oleh struktur/susunan organisasi adalah sebagai berikut :

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas bertugas untuk memimpin tugas pokok dan fungsi, sebagaimana tersebut di atas.

B. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, barang milik negara/daerah, arsip dan dokumentasi, serta membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan bidang-bidang. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
- c. penyiapan bahan dan mengkoordinasikan perencanaan program kegiatan dan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang perangkat daerah;
- d. penyiapan bahan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;
- e. penyiapan dan menyusun bahan terkait ketatalaksanaan;
- f. penyiapan bahan Laporan bulanan, triwulan, semester, tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lingkup perangkat daerah;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi seluruh program kerja perangkat daerah; menyusun program kerja perangkat daerah;
- h. pelaksanaan implementasi akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
- i. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- j. penyusunan dan penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah;
- k. penyusunan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.t.

C. Bidang Kelautan, Konservasi dan Pengawasan

Bidang Kelautan, Konservasi dan Pengawasan mempunyai mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait kelautan, konservasi dan pengawasan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Kelautan, Konservasi dan Pengawasan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil, konservasi dan sumberdaya hayati, pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan Penyusunan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis aspek pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi, penyusunan dan penetapan rencana zonasi atau materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, rehabilitasi dan mitigasi bencana wilayah pesisir dan pulau pulau kecil;
- c. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, kebijakan reklamasi pantai, mitigasi bencana alam dan kerusakan lingkungan pesisir dan laut termasuk sumberdaya alam di wilayah laut;
- d. pelaksanaan penyusunan bahan fasilitasi pendayagunaan pulau-pulau kecil meliputi pengembangan gugus pulau, penataan lingkungan, penguatan masyarakat adat dan lokal, dan pendayagunaan pulau-pulau terluar;
- e. pelaksanaan penyusunan bahan fasilitasi pendayagunaan pesisir meliputi pesisir terpadu, restorasi pesisir, reklamasi dan pengembangan kawasan, mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim;
- f. pelaksanaan Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
- g. pelaksanaan pemantauan pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi aspek pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil;

- h. pelaksanaan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial aspek pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- i. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan, penataan, pengelolaan dan pengendalian teknis aspek kawasan konservasi dan keanekaragaman sumberdaya hayati;
- j. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan perlindungan, pelestarian keanekaragaman, pemanfaatan konservasi dan keanekaragaman hayati, serta kemitraan dan pengembangan sarana prasarana konservasi;
- k. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan pengelolaan, pemetaan dan penyerasian dan pengharmonisasian pengelolaan wilayah dan sumberdaya laut, pengaturan konservasi, pencegahan pencemaran, rehabilitasi sumberdaya pesisir serta pengelolaan kekayaan laut;
- l. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan pengelolaan wilayah laut, pencegahan pencemaran, kerusakan sumberdaya ikan, dan rehabilitasi sumberdaya pesisir, pulau-pulau kecil dan laut serta lingkungannya;
- m. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan pengelolaan dan konservasi plasma nutfah spesifik lokasi, kawasan konservasi perairan dan rehabilitasi perairan;
- n. pelaksanaan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial aspek konservasi dan keanekaragaman sumberdaya hayati;
- o. pelaksanaan pengelolaan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan penetapan dari pemerintah pusat;
- p. pelaksanaan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai aspek konservasi dan keanekaragaman sumberdaya hayati sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- q. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan, penataan, pengelolaan dan pengendalian teknis aspek kawasan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
- r. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan, Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap dan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil;
- s. pelaksanaan penyusunan bahan fasilitasi penyidikan tindak pidana, penanganan barang bukti, awak kapal, tindak lanjut pidana kelautan dan perikanan serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) perikanan dan kerjasama penegakan hukum;
- t. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan pembinaan, pemantauan dan pengendalian teknis pelaksanaan urusan pemerintahan aspek pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- u. pelaksanaan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS);
- v. pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Perikanan, Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap, Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan dan Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan sampai dengan 12 mil;
- w. pelaksanaan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi, pemantauan terhadap permohonan bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial serta realisasi aspek pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- x. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- y. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

D. Bidang Perikanan Tangkap

Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait pengelolaan sumber daya ikan dan kenelayanan, kapal perikanan dan alat penangkap ikan dan pelabuhan perikanan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait pengelolaan sumber daya ikan dan kenelayanan, kapal perikanan dan alat penangkap ikan, dan pelabuhan perikanan.
- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis pengelolaan sumberdaya ikan dan kenelayanan;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perikanan tangkap, aspek pengelolaan sumberdaya ikan dan kenelayanan;
- d. pelaksanaan pendataan produksi hasil perikanan, penyusunan statistik perikanan tangkap dan pembinaan kelembagaan nelayan;
- e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian teknis aspek dan fasilitasi pengelolaan sumberdaya ikan dan kenelayanan;
- f. pelaksanaan kebijakan sistem informasi kenelayanan dan penguatan, kapasitas kelembagaan, sistem akses permodalan, promosi dan investasi di bidang perikanan tangkap;
- g. pelaksanaan verifikasi, rekomendasi, pemantauan terhadap permohonan bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial serta realisasi aspek Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Kenelayanan;
- h. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- i. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis izin usaha kapal perikanan dan alat penangkap ikan serta pengembangan dan penyebarluasan teknologi penangkapan ikan yang produktif dan ramah lingkungan;
- j. pelaksanaan pengendalian dan pertimbangan teknis izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan dan pemanfaatan alat bantu penangkapan ikan di wilayah laut dan perairan umum, pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, serta pendaftaran kapal perikanan dengan ukuran 1 GT s/d 30 GT;
- k. pelaksanaan pengendalian kegiatan, pemantauan dan evaluasi penggunaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan;
- l. pelaksanaan verifikasi, rekomendasi, pemantauan terhadap permohonan bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial serta realisasi aspek Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan;
- m. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- n. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengendalian serta menghimpun bahan kebijakan teknis pelabuhan perikanan meliputi inventarisasi, identifikasi dan analisis data serta penyusunan sistem informasi potensi Pelabuhan Perikanan;
- o. pelaksanaan kebijakan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Pelabuhan Perikanan, kebijakan rencana pembangunan/rehabilitasi serta penetapan lokasi pelabuhan perikanan baru dan kebijakan pembangunan jasa-jasa pelabuhan perikanan;

- p. pelaksanaan kebijakan standarisasi teknis Pelabuhan Perikanan di wilayah laut dan perairan umum, kebijakan tata operasional pelabuhan perikanan dan koordinasi kesyahbandaran dan pemantauan dan evaluasi teknis pelabuhan perikanan;
- q. pelaksanaan verifikasi, rekomendasi, pemantauan terhadap permohonan bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial serta realisasi aspek pelabuhan perikanan;
- r. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

E. Bidang Perikanan Budidaya

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait produksi dan usaha, sarana dan prasarana, kesehatan ikan dan lingkungan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait produksi dan usaha, sarana dan prasarana, kesehatan ikan dan lingkungan.
- b. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, pengembangan usaha pembudidayaan ikan, fasilitasi dan penerbitan izin usaha, pendataan sarana prasarana, dan produksi perikanan budidaya;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perikanan budidaya meliputi inventarisasi, identifikasi dan analisis data, pengumpulan data statistik perikanan budidaya serta penyusunan sistem informasi potensi produksi dan usaha pengembangan perikanan air tawar, air payau dan laut;
- d. pelaksanaan uji coba percontohan penerapan teknologi budidaya ikan spesifik wilayah dan bahan teknis peningkatan produksi perikanan budidaya yang meliputi induk, benih dan ikan konsumsi melalui penerapan cara pembenihan ikan yang baik (CPIB);
- e. pelaksanaan standarisasi, kelayakan teknis serta evaluasi penerapan teknologi dalam kegiatan pengembangan usaha perikanan air tawar, air payau dan laut;
- f. pelaksanaan koordinasi, kerjasama kemitraan, pengembangan sumberdaya manusia dan kelembagaan pembudidayaan ikan, fasilitasi dan pendampingan terhadap pembudidayaan ikan dalam rangka pengembangan investasi;
- g. pelaksanaan verifikasi, rekomendasi, pemantauan terhadap permohonan bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial serta realisasi aspek produksi dan usaha;
- h. pelaksanaan penyediaan prasarana pembudidayaan ikan di laut;
- i. pelaksanaan penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan di laut;
- j. pelaksanaan penyediaan prasarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah Kabupaten/Kota;
- k. pelaksanaan penyediaan sarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah Kabupaten/Kota;
- l. pelaksanaan monitoring, inventarisasi, identifikasi dan analisis data, evaluasi standarisasi kelayakan teknis dan mutu, ketersediaan sarana dan prasarana pengembangan budidaya perikanan air tawar, air payau dan air laut;
- m. pelaksanaan verifikasi, rekomendasi, pemantauan terhadap permohonan bantuan aspek Sarana dan Prasarana budidaya perikanan;

- n. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan pencegahan, penanggulangan hama, penyakit dan pencemaran perairan serta dampak yang ditimbulkan dalam aspek kesehatan ikan dan lingkungan;
- o. pelaksanaan perlindungan sumberdaya meliputi inventarisasi, identifikasi dan analisis data serta penyusunan sistem informasi potensi sumberdaya ikan, kondisi ikan-ikan langka dilindungi, hama penyakit ikan, bahan pencemar perairan serta penggunaan bahan kimia dalam kegiatan budidaya ikan;
- p. pelaksanaan pengelolaan lingkungan, pengendalian, pengawasan, peredaran dan penggunaan obat ikan bahan kimia, bahan biologi, dampak penggunaan sarana produksi serta higienitas dan sanitasi lingkungan usaha perikanan budidaya;
- q. pelaksanaan inventarisasi data kerusakan fisik dan estimasi nilai kerugian yang ditimbulkan oleh dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan perairan;
- r. pelaksanaan pembinaan, pengendalian teknis, monitoring dan evaluasi kondisi sumberdaya ikan dan sumberdaya perairan serta fasilitasi kesehatan ikan dan lingkungan;
- s. pelaksanaan verifikasi, rekomendasi, pemantauan terhadap permohonan bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial serta realisasi aspek produksi dan usaha, sarana dan prasarana serta kesehatan ikan dan lingkungan;
- t. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- u. pelaksanaan pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan kawasan pembudidayaan ikan; dan
- v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

F. Bidang Pengolahan dan Pemasaran

Bidang Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait bina mutu dan diversifikasi produk, pengembangan investasi dan logistik, promosi dan pemasaran. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengolahan dan Pemasaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait bina mutu dan diversifikasi produk, pengembangan investasi dan logistik, promosi dan pemasaran.
- b. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis aspek pengembangan mutu dan diversifikasi produk meliputi inventarisasi, identifikasi dan analisis data serta penyusunan sistem informasi unit usaha pengolahan perikanan skala kecil, menengah, eksportir dan industri perikanan, dan fasilitas penunjang pasca panen;
- c. pelaksanaan pengembangan mutu dan diversifikasi produk serta bahan kebijakan teknis kendali mutu di unit pengolahan sesuai standar Pengolahan Ikan yang Baik (good manufacturing practice/sertifikasi kelayakan pengolahan) dan Prosedur Penerapan Teknis Sanitasi dan Higienis di Unit Pengolahan Ikan (UPI);
- d. pelaksanaan fasilitasi, kriteria dan prosedur mutu serta pengolahan berdasarkan skala usaha pengolahan tradisional, menengah dan modern;
- e. pelaksanaan sosialisasi dan uji coba teknologi baru/teknologi terapan diversifikasi produk hasil perikanan, kerjasama dengan instansi/lembaga penelitian, dan peningkatan keterampilan sumberdaya manusia pengolah hasil perikanan;

- f. pelaksanaan pembinaan, pengendalian teknis dan pemantauan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan aspek pengembangan mutu dan diversifikasi produk;
- g. pelaksanaan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk;
- h. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- i. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan pengembangan investasi dan logistik meliputi inventarisasi, identifikasi dan analisis data, penyusunan sistem informasi investasi dan logistik, serta pelayanan usaha;
- j. pelaksanaan fasilitasi, standarisasi, kriteria, prosedur, dan sosialisasi teknis pengembangan investasi dan logistik hasil perikanan;
- k. pelaksanaan fasilitasi pemetaan dan informasi produk kelautan dan perikanan, jaringan distribusi dan kerjasama kelembagaan, tata kelola dan pemantauan produk kelautan dan perikanan;
- l. pelaksanaan standarisasi dan diklat sertifikasi sistem mutu hasil perikanan, pengumpulan dan analisa data statistik, ketenagakerjaan dan kemitraan;
- m. pelaksanaan penerbitan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan;
- n. pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pemantauan pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi aspek pengembangan investasi dan logistik;
- o. pelaksanaan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di Seksi Pengembangan Investasi dan Logistik;
- p. pelaksanaan evaluasi, pelaporan, pengendalian dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Seksi Pengembangan Investasi dan Logistik;
- q. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- r. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian teknis aspek Promosi dan Pemasaran meliputi inventarisasi, identifikasi dan analisis data serta penyusunan sistem informasi unit usaha pengolahan perikanan skala kecil, menengah, besar, eksportir dan industri perikanan dan potensi pasar lokal;
- s. pelaksanaan promosi, pemasaran hasil perikanan, sosialisasi penerapan persyaratan dan standar, pedoman, kriteria dan prosedur pengembangan serta fasilitasi dan penguatan Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- t. pelaksanaan rekomendasi, kebijakan promosi dan pemasaran hasil perikanan melalui pameran, bazaar, expo, festival, demo dan promosi usaha lainnya;
- u. pelaksanaan manajemen pemasaran hasil perikanan kepada pelaku usaha melalui temu usaha, temu bisnis dan lainnya;
- v. pelaksanaan peningkatan peluang pasar dan konsumsi ikan masyarakat melalui gerakan memasyarakatkan makan ikan;
- w. pelaksanaan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial aspek bina mutu dan diversifikasi produk, pengembangan investasi dan logistik serta promosi dan pemasaran;

- x. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- y. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

G. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

1. UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)

Tugas Pokok dan Fungsi

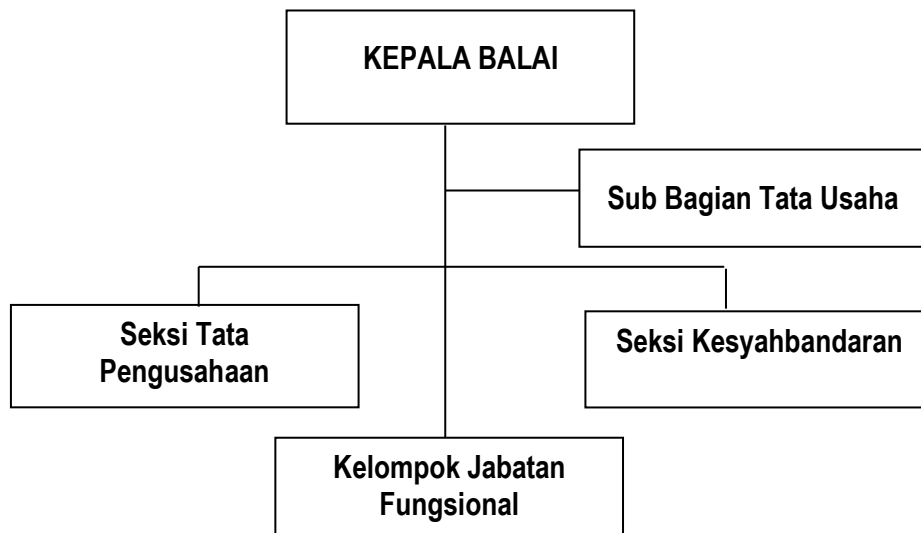
UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) berkedudukan di Desa Antang, Kec. Tarempa Kabupaten Kepulauan Anambas, dan dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.

UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pengelolaan pelabuhan perikanan pantai, kesyahbandaran perikanan, pelayanan teknis kapal perikanan, fasilitasi produksi dan pemasaran hasil perikanan.

UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) dalam melaksanakan tugas mempunyai rincian tugas, sebagai berikut:

- a. menyusun bahan perencanaan operasional di lingkungan UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Pantai;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Pantai;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Pantai;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Pantai;
- e. menyusun bahan tugas-tugas dan kebijakan teknis terkait ketatausahaan;
- f. menyusun bahan tugas-tugas dan kebijakan teknis terkait tata pengusahaan;
- g. menyusun bahan tugas-tugas dan kebijakan teknis terkait kesyahbandaran;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Pantai;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Pantai; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Struktur Organisasi UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Pantai



Gambar 2.2. Struktur Organisasi UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Pantai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau

2. UPTD Balai Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan

Tugas Pokok dan Fungsi

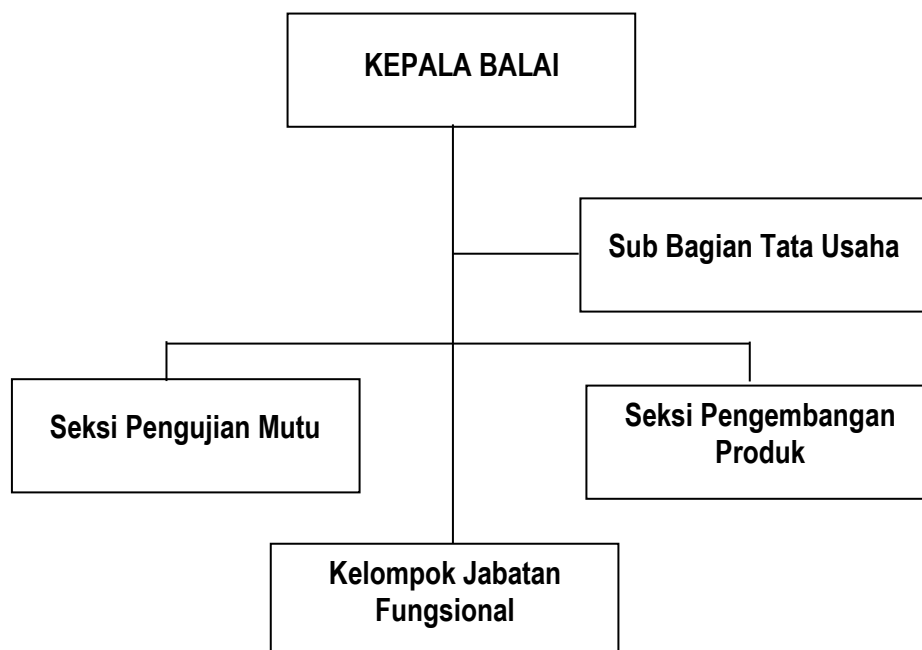
UPTD Balai Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan (BPMPPKP) sesuai Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.

UPTD BPMPPKP Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pengujian, jaminan mutu dan pengembangan produk kelautan dan perikanan.

UPTD BPMPPKP Provinsi Kepulauan Riau mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- menyusun bahan perencanaan operasional di lingkungan UPTD BPMPPKP;
- mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan UPTD BPMPPKP;
- memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan UPTD BPMPPKP;
- meyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD BPMPPKP;
- menyusun bahan tugas-tugas dan kebijakan teknis terkait pengembangan produk;
- menyusun bahan tugas-tugas dan kebijakan teknis terkait ketatausahaan;
- menyusun bahan tugas-tugas dan kebijakan teknis terkait pengembangan produk;
- mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD BPMPPKP;
- menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan UPTD BPMPPKP;
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

**Struktur Organisasi UPTD Balai Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk
Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kepulauan Riau**



Gambar 2.3. Struktur Organisasi UPTD BPMPPKP pada DKP Provinsi Kepulauan Riau

3. UPTD Balai Benih Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau

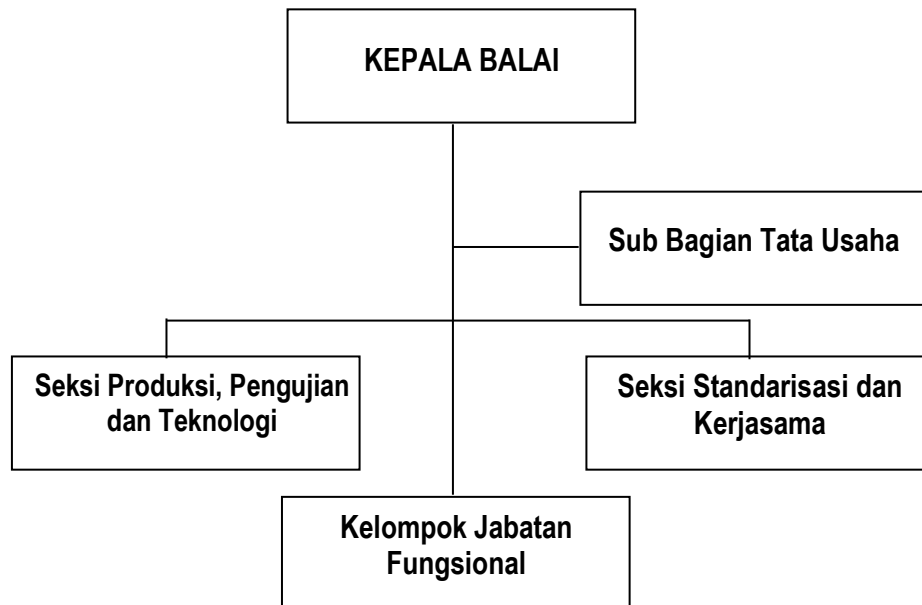
Tugas Pokok dan Fungsi

UPTD Balai Benih Ikan (BBI) sesuai Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.

UPTD BBI Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang perikanan budidaya, aspek pembenihan dan pengelolaan benih ikan bermutu dan induk unggul serta melaksanakan pembinaan teknis terhadap pembudidaya ikan. Kepala UPTD BBI Provinsi Kepulauan Riau mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a) Menyusun bahan perencanaan operasional di lingkungan UPTD BBI;
- b) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan UPTD BBI;
- c) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan UPTD BBI;
- d) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD BBI;
- e) Menyusun bahan-bahan tugas dan kebijakan teknis terkait ketatausahaan;
- f) Menyusun bahan-bahan tugas dan kebijakan teknis terkait produksi, pengujian dan teknologi;
- g) Menyusun bahan-bahan tugas dan kebijakan teknis terkait standarisasi dan kerjasama;
- h) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD BBI;
- i) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan UPTD BBI; dan
- j) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

**Struktur Organisasi UPTD Balai Benih Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kepulauan Riau**



Gambar 2.4. Struktur Organisasi UPTD Balai Benih Ikan pada DKP Provinsi Kepulauan Riau

C. CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Cabang Dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dibentuk Cabang Dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau. Cabang dinas sebagaimana dimaksud antara lain :

1. Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Batam;
2. Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Karimun;
3. Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Natuna;
4. Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Anambas; dan
5. Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Lingga.

Tugas Pokok dan Fungsi

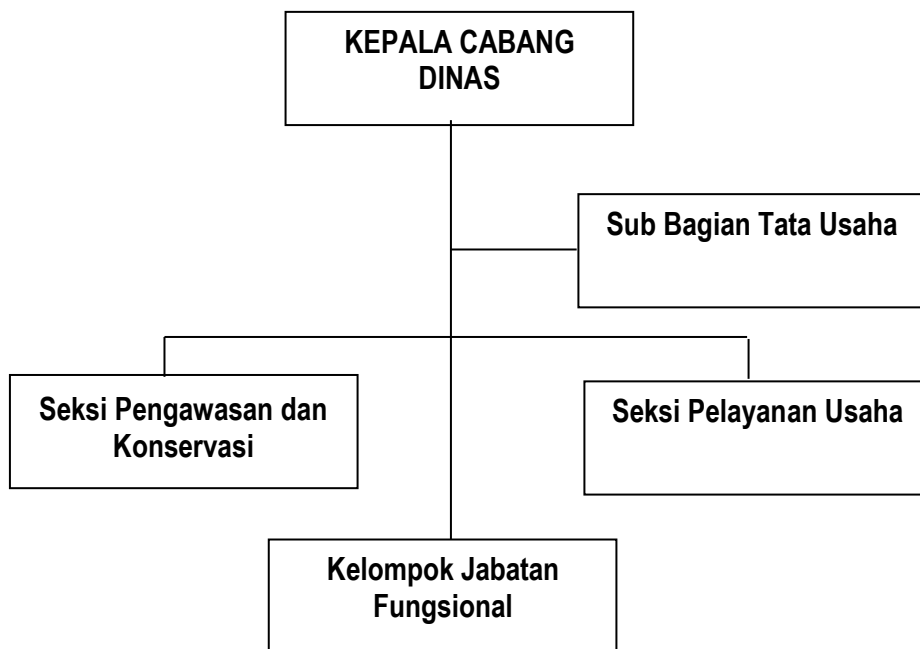
Cabang dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi di wilayah kerjanya. Kepala Cabang Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan program sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya;
- b) Koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya;
- c) Koordinasi dan pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya; dan
- d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi dimaksud, Kepala Cabang Dinas mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a) Menyusun bahan perencanaan operasional di lingkungan Cabang Dinas;
- b) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Cabang Dinas;
- c) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Cabang Dinas;
- d) Menyusun bahan-bahan tugas dan kebijakan teknis terkait ketatausahaan;
- e) Menyusun bahan-bahan tugas dan kebijakan teknis terkait pengawasan dan konservasi;
- f) Menyusun bahan-bahan tugas dan kebijakan teknis terkait pelayanan usaha;
- g) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Cabang Dinas
- h) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Cabang Dinas;
- i) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Cabang Dinas; dan
- j) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Struktur Organisasi Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan



Gambar 2.5. Struktur Organisasi Cabang Dinas pada DKP Provinsi Kepulauan Riau

2.2. SUMBERDAYA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPRI

2.2.1. Jumlah Pegawai

Pada tahun 2023 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau memiliki jumlah pegawai sebanyak 308 orang terdiri dari 95 orang PNS, 100 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan 113 orang Tenaga Harian Lepas (THL).

Sebagaimana disajikan pada Tabel 2.2.a, dapat diketahui bahwa berdasarkan golongannya jumlah pegawai Golongan I berjumlah 0 orang, Golongan II 13 orang, Golongan III 71 orang dan Golongan IV 11 orang.

Berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah pegawai yang lulusan SD adalah 1 orang, SMP 0 orang, SMA 14 orang, D3 7 orang, D4 8 orang, S1 56 orang, S2 13 orang. Data jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.2.b.

TABEL 2.2.A.
REKAPITULASI JUMLAH PEGAWAI DKP PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

NO	UNIT ORGANISASI	JUMLAH	P E G A W A I																							
		(2+3+4+9 +14+19+25)	THL	PTT	PPPK	Jumlah (5 s/d 8)	I				Jumlah (10 s/d 13)	II				Jumlah (16 s/d 19)	III				Jumlah (21 s/d 25)	IV				
							a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d	e
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Dinas Induk																									
	Kepala Dinas	1				0					0										1			1		
	Sekretaris	1				0					0										1		1			
	Sekretariat (Perencanaan)	6	2	1		0					0					3		1		2	0					
	Sub Bag Keuangan	8	3	1		0					2			2		2			1	1	0					
	Sub Bag Umum Kepegawaian	16	5	6		0					1		1			4	3			1	0					
	Bid Kelautan Konservasi dan Pengawasan	25	9	5		0					3			2	1	7	1	2	1	3	1		1			
	Bid Perikanan Tangkap	23	2	10		0					1				1	9	1	2	1	5	1	1				
	Bid Perikanan Budidaya	26	8	8		0					0					8			5	3	2		2			
	Bid Pengolahan dan Pemasaran	21	3	6		0					0					10		4	4	2	2	2				
	Jumlah	127	32	37		0					7	0	1	4	2	43	5	9	12	17	8	3	4	1	0	0
2	Cabang Dinas																									
	Cabang Dinas Batam	22	4	9	1	0					1				1	7	1	2	4		0					
	Cabang Dinas Karimun	34	18	9	2	0					0					4		2		2	1	1				
	Cabang Dinas Lingga	18	11	2	1	0					0					4			1	3	0					
	Cabang Dinas Anambas	12	6		1	0					0					4		1	2	1	1	1				
	Cabang Dinas Natuna	20	10	5	1	0					0					1				1	3	3				
	Jumlah	106	49	25	6	0					1	0	0	0	1	20	1	5	7	7	5	5	0	0	0	0
3	UPTD																									
	UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Pantai	17	10	3		0					0					4			2	2	0					
	UPTD BPMP2KP	19	6	7		0					0					4	1		1	2	2	2				
	UPTD Balai Benih Ikan	31	10	16		0					1		1			3				3	1	1				
	Jumlah	67	26	26	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	11	1	0	3	7	3	3	0	0	0	0
	J U M L A H	300	107	88	6	0	0	0	0	0	9	0	2	4	3	74	7	14	22	31	16	11	4	1	0	0

TABEL 2.2.B.

REKAPITULASI JUMLAH PEGAWAI MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN & JENIS KELAMIN DI DKP PROVINSI KEPRI TAHUN 2023

NO	UNIT ORGANISASI	TINGKAT PENDIDIKAN										JENIS KELAMIN	
		SD	SMP	SMA	D1	D2	D3 SM	D4	S1	S2	S3	L	P
1	Dinas Induk												
	Kepala Dinas										1	1	
	Sekretaris								1			1	
	Sekretariat (Perencanaan)							1	2			2	1
	Sub Bag Keuangan			1			1		2			2	2
	Sub Bag Umum Kepegawaian			2					2	1		2	1
	Bid Kelautan Konservasi dan Pengawasan			3			1		7	2		10	3
	Bid Perikanan Tangkap						2	1	7	1		7	4
	Bid Perikanan Budidaya							1	6	3		7	3
	Bid Pengolahan dan Pemasaran								9	1		5	5
	Jumlah	0	0	6	0	0	4	3	36	8	1	37	19
2	Cabang Dinas												
	Cabang Dinas Batam			3			2		3			5	3
	Cabang Dinas Karimun								7			5	2
	Cabang Dinas Lingga								5			5	
	Cabang Dinas Anambas								5			4	1
	Cabang Dinas Natuna								4	1		5	
	Jumlah	0	0	3	0	0	2	0	24	1	0	24	6
3	UPTD												
	UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Pantai								4			4	
	UPTD BPMP2KP			1					4	1		2	4
	UPTD Balai Benih Ikan			1				1	2	1		4	1
	Jumlah	0		2			1	1	6	3		9	4
	J U M L A H	0	0	11	0	0	7	4	66	12	1	70	29

Sumber : DKP Prov Kepulauan Riau Tahun 2021

2.2.2. Analisa Kebutuhan Pegawai

Kondisi saat ini pada tahun 2023 Pegawai Negeri Sipil berjumlah 98 orang PNS, sedangkan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja pada jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu sebanyak 203 orang PNS, sebagaimana tabel 2.2.c.

TABEL 2.2.C.
REKAPITULASI KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN BEBAN KERJA DI DKP
PROV KEPRI TAHUN 2023

NO	NAMA JABATAN	PEMANGKU	HASIL ABK	KELEBIHAN / KEKURANGAN
1	KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1	1	0
2	Fungsional Pengawas Perikanan Ahli Madya	1	2	1
3	Fungsional Pengawas Perikanan/Analisis Akuakultur Ahli Madya	0	4	4
4	Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Madya	0	12	12
5	Fungsional Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Madya	0	2	2
6	Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Madya	0	3	3
7	Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Madya	0	2	2
8	Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Madya	0	2	2
9	Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Madya	0	3	3
10	Fungsional Perencana Ahli Madya	0	1	1
11	SEKRETARIS	1	1	0
12	Fungsional Perencana Ahli Muda	1	1	0
13	Fungsional Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	0	1	1
14	Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda	0	3	3
15	Fungsional Arsiparis Ahli Muda	0	2	2
16	Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	0	1	1
17	Fungsional Statistisi Ahli Pertama	0	1	1
18	Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama	0	1	1
19	Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Pertama	0	1	1
20	Fungsional Perencana Ahli Pertama	0	1	1
21	Fungsional Pranata Komputer Terampil	0	1	1
22	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	2	3	1
23	Pengelola Bahan Perencanaan	0	1	1
24	Analisis Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan	0	1	1
25	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1	1	0
26	Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	0	1	1
27	Fungsional Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	0	1	1
28	Fungsional Arsiparis Ahli Pertama	0	2	2
29	Fungsional Pranata SDM Aparatur Terampil	0	1	1
30	Fungsional Arsiparis Penyelia	0	2	2
31	Fungsional Arsiparis Mahir	0	3	3
32	Fungsional Arsiparis Terampil	0	5	5
33	Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Mahir	0	1	1
34	Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	0	1	1
35	Pengadministrasian Kepegawaian	0	2	2

NO	NAMA JABATAN	PEMANGKU	HASIL ABK	KELEBIHAN / KEKURANGAN
36	Pengadministrasi Umum	2	2	0
37	Sekretaris	0	1	1
38	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	0	2	2
39	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	1	1	0
40	Pengadministrasi Keuangan	1	2	1
41	Verifikator Keuangan	1	3	2
42	Bendahara	1	1	0
43	Penata Laporan Keuangan	0	2	2
44	KEPALA BIDANG KELAUTAN KONSERVASI DAN PENGAWASAN	1	1	0
45	Fungsional Pengawas Perikanan Ahli Muda	1	2	1
46	Fungsional Pengelolaan Ekosistem Laut dan Pesisir Muda	2	20	18
47	Fungsional Pengawas Perikanan Pertama	1	2	1
48	Fungsional Pengawas Perikanan Penyelia	0	1	1
49	Fungsional Pengawas Perikanan Lanjutan	1	2	1
50	Fungsional Pengawas Perikanan Terampil	0	3	3
51	Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Muda	0	8	8
52	Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama	0	10	10
53	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Pertama	0	1	1
54	Pengelola Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	0	1	1
55	Analis Pencemaran Laut	1	1	0
56	Mualim Kapal	0	2	2
57	Fungsional Pengelolaan Ekosistem Laut dan Pesisir Pertama	2	21	19
58	Analis Konservasi dan Rehabilitasi Wilayah Pesisir	1	1	0
59	Teknisi Konservasi Kelautan dan Perikanan	1	1	0
60	Analis kelautan dan perikanan	0	2	2
61	Analis pengembangan potensi daerah	0	1	1
62	Analis Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	0	1	1
63	Pengadministrasi Identifikasi Pulau Pulau Kecil	2	2	0
64	KEPALA BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA	1	1	0
65	Pengawas Perikanan/Analis Akuakultur Ahli Muda	6	7	1
66	Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Muda	1	2	1
67	Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Pertama	0	1	1
68	Pengawas Perikanan/Analis Akuakultur Ahli Pertama	0	5	5
69	Analis Kebijakan Ahli Pertama	0	1	1
70	Teknisi Akuakultur Penyelia	0	1	1
71	Teknisi Akuakultur Mahir	0	2	2
72	Teknisi Akuakultur Terampil	0	3	3
73	Teknisi Akuakultur Pemula	0	4	4
74	Analis Benih	0	1	1
75	Analis Budidaya Perikanan	0	2	2
76	Petugas Standarisasi dan Sertifikasi	0	1	1
77	Pengelola Statistik Perikanan	0	1	1

NO	NAMA JABATAN	PEMANGKU	HASIL ABK	KELEBIHAN / KEKURANGAN
78	Pengelola Teknologi Perbenihan	0	1	1
79	Penyusun Rencana Bahan Teknis Prasarana dan Sarana Budidaya	1	2	1
80	Analisis Kesehatan Ikan dan Lingkungan	0	3	3
81	Pengelola Penyehatan Lingkungan	0	1	1
82	KEPALA BIDANG PERIKANAN TANGKAP	1	1	0
83	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda	4	4	0
84	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Pertama	2	6	4
85	Pengelola Statistik Perikanan	0	1	1
86	Analisis Tata Kelola Sumber Daya Ikan	1	2	1
87	Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Penyelia	0	3	3
88	Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Lanjutan	1	4	3
89	Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Terampil	1	8	7
90	Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pemula	0	7	7
91	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	0	1	1
92	Analisis Rancang Bangun Kapal Perikanan	0	2	2
93	Analisis Rancang Bangun Alat Penangkap Ikan	1	2	1
94	Analisis Kepelabuhanan Perikanan	0	1	1
95	KEPALA BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN	1	1	0
96	Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda	2	3	1
97	Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda	2	3	1
98	Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama	1	2	1
99	Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Pertama	0	1	1
100	Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan Pertama	0	2	2
101	Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan Mahir	0	1	1
102	Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan Penyelia	0	1	1
103	Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan Terampil	0	1	1
104	Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Penyelia	0	2	2
105	Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Mahir	0	3	3
106	Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Terampil	0	3	3
107	Analisis Mutu Hasil Perikanan	1	2	1
108	Pengelola Sertifikasi	0	1	1
109	Penyusun Rencana Investasi	2	2	2
110	Penyusun Rencana Kelembagaan Pasar Hasil Perikanan	1	2	1
111	Pengelola Pengembangan dan Pembinaan Usaha	0	3	3
112	Penyusun Rencana Promosi	1	1	0
113	KEPALA UPTD BALAI PENGUJIAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	1	1	0
114	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda	0	1	1
115	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	1	1	0

NO	NAMA JABATAN	PEMANGKU	HASIL ABK	KELEBIHAN / KEKURANGAN
116	Arsiparis Terampil	0	1	1
117	Pengadministrasi Umum	1	2	1
118	Pranata Kearsipan	0	1	1
119	Pengelola Program dan Laporan	0	1	1
120	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	0	1	1
121	Penata Laporan Keuangan	0	1	1
122	KEPALA SEKSI PENGUJIAN MUTU	0	1	1
123	Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pertama	0	1	1
124	Pengelola Laboratorium	0	2	2
125	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PRODUK	1	1	0
126	Pengelola Pelaksanaan Pengujian Mutu Secara Laboratoris Terhadap Produk	0	2	2
127	KEPALA UPTD BALAI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI	1	1	0
128	Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda	0	2	2
129	Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Muda	0	2	2
130	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	1	1	0
131	Fungsional Arsiparis Terampil	0	1	1
132	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	0	1	1
133	Pengadministrasi Umum	0	1	1
134	Pranata Kearsipan	0	1	1
135	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	0	1	1
136	Penata Laporan Keuangan	0	1	1
137	Operator Speedboat	0	1	1
138	KEPALA SEKSI KESYAHBANDARAN	1	1	0
139	Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pertama	0	1	1
140	Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Penyelia	0	1	1
141	Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Mahir	0	4	4
142	Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Terampil	0	4	4
143	Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pemula	0	3	3
144	Pengelola Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan	0	2	2
145	Operator Komunikasi	0	1	1
146	Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Penyelia	0	2	2
147	Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Lanjutan	0	2	2
148	Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Terampil	0	2	2
149	SEKSI TATA PENGUSAHAAN	1	1	0
150	Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Pertama	0	1	1
151	Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Penyelia	0	2	2
152	Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pemula	0	3	3
153	Teknisi Peralatan dan Mesin	0	2	2
154	Pengelola Layanan Pelabuhan dan Steigher	0	1	1
155	Pengelola Instalasi Air dan Listrik	0	1	1

NO	NAMA JABATAN	PEMANGKU	HASIL ABK	KELEBIHAN / KEKURANGAN
156	KEPALA UPTD BALAI BENIH IKAN (BBI)	1	1	0
157	Fungsional Pengawas Perikanan/Analisis Akuakultur Ahli Muda	0	2	2
158	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	1	1	0
159	Fungsional Arsiparis Terampil	0	1	1
160	Pengadministrasi Umum	1	1	0
161	Pranata Kearsipan	0	1	1
162	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	0	1	1
163	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	0	1	1
164	Penata Laporan Keuangan	0	1	1
165	Operator speedboat	0	1	1
166	KEPALA SEKSI PRODUKSI, PENGUJIAN DAN TEKNOLOGI	1	1	0
167	Fungsional Pengawas Perikanan/Analisis Akuakultur Ahli Pertama	0	1	1
168	Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Pertama	0	1	1
169	Analisis Benih	0	2	2
170	Pengelola Teknologi Perbenihan	0	1	1
171	Pengelola Laboratorium	0	1	1
172	KEPALA SEKSI STANDARISASI DAN KERJASAMA	1	1	0
173	Penyusun Rencana Pelayanan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	0	1	-1
174	KEPALA CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM	1	1	0
175	Fungsional Pengawas Perikanan Ahli Muda	0	1	1
176	Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda	0	1	1
177	Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda	0	1	1
178	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	1	1	0
179	Fungsional Arsiparis Mahir	0	1	1
180	Fungsional Arsiparis Terampil	0	1	1
181	Pengadministrasi Umum	1	1	0
182	Analisis Pengaduan Masyarakat	0	1	1
183	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	0	1	1
184	Verifikator Keuangan	1	1	0
185	Penata Laporan Keuangan	0	2	2
186	KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN KONSERVASI	1	1	0
187	Fungsional Pengawas Perikanan/Analisis Akuakultur Ahli Pertama	0	1	-1
188	Fungsional Pengawas Perikanan Ahli Pertama	1	1	0
189	Analisis Konservasi dan Rehabilitasi Wilayah Pesisir	0	1	1
190	Pengadministrasi Identifikasi Pulau-Pulau Kecil	1	1	0
191	KEPALA SEKSI PELAYANAN USAHA	1	1	0
192	Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama	0	2	2
193	Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Pertama	0	1	1
194	Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan Mahir	0	1	1
195	Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan Terampil	0	1	1
196	Penyusun Rencana Pelayanan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	1	1	0
197	KEPALA CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1	1	0

NO	NAMA JABATAN	PEMANGKU	HASIL ABK	KELEBIHAN / KEKURANGAN
	KARIMUN			
198	Fungsional Pengawas Perikanan Ahli Muda	0	1	1
199	Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda	0	1	1
200	Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Muda	0	1	1
201	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	1	1	0
202	Fungsional Arsiparis Terampil	0	1	1
203	Pengadministrasi Umum	0	1	1
204	Pengadministrasi Persuratan	0	1	1
205	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	0	1	1
206	Penata Laporan Keuangan	0	1	1
207	Analisis Pengaduan Masyarakat	0	1	1
208	KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN KONSERVASI	1	1	0
209	Fungsional Pengawas Perikanan/Analisis Akuakultur Ahli Pertama	0	1	1
210	Fungsional Pengawas Perikanan Ahli Pertama	2	2	0
211	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama	0	1	1
212	Analisis Konservasi dan Rehabilitasi Wilayah Pesisir	0	1	-1
213	Pengadministrasi Identifikasi Pulau-Pulau Kecil	0	1	-1
214	KEPALA SEKSI PELAYANAN USAHA	1	1	0
215	Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama	0	1	1
216	Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Pertama	1	1	0
217	Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan Mahir	0	1	1
218	Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan Terampil	0	1	1
219	Penyusun Rencana Pelayanan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	0	1	0
220	KEPALA CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN LINGGA	1	1	0
221	Fungsional Analisis Akuakultur Ahli Muda	0	1	1
222	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	1	1	0
223	Fungsional Arsiparis Mahir	0	1	1
224	Fungsional Arsiparis Terampil	0	1	1
225	Pengadministrasi Umum	0	1	1
226	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	0	1	1
227	Penata Laporan Keuangan	0	1	1
228	Analisis Pengaduan Masyarakat	0	1	1
229	KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN KONSERVASI	1	1	0
230	Fungsional Pengawas Perikanan/Analisis Akuakultur Ahli Pertama	0	1	1
231	Fungsional Pengawas Perikanan Ahli Pertama	1	1	0
232	Fungsional Pengawas Perikanan/Asisten Pengawas Perikanan Terampil	0	1	1
233	Analisis Konservasi dan Rehabilitasi Wilayah Pesisir	0	1	1
234	Pengadministrasi Identifikasi Pulau-Pulau Kecil	0	1	1
235	KEPALA SEKSI PELAYANAN USAHA	1	1	0
236	Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama	0	1	1
237	Penyusun Rencana Pelayanan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	0	1	1
238	KEPALA CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NATUNA	1	1	0

NO	NAMA JABATAN	PEMANGKU	HASIL ABK	KELEBIHAN / KEKURANGAN
239	Fungsional Pengawas Perikanan Ahli Muda	1	1	0
240	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	1	1	1
241	Fungsional Arsiparis Ahli Pertama	0	1	1
242	Fungsional Arsiparis Terampil	0	1	1
243	Pengadministrasi Umum	0	1	1
244	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	0	1	1
245	Penata Laporan Keuangan	0	1	1
246	Analisis Pengaduan Masyarakat	1	1	0
247	KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN KONSERVASI	1	1	0
248	Fungsional Pengawas Perikanan/Analisis Akuakultur Ahli Pertama	0	1	1
249	Fungsional Pengawas Perikanan Ahli Pertama	1	1	0
250	Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama	0	1	1
251	Analisis Konservasi dan Rehabilitasi Wilayah Pesisir	0	1	1
252	Pengadministrasi Identifikasi Pulau-Pulau Kecil	0	1	1
253	KEPALA SEKSI PELAYANAN USAHA	1	1	0
254	Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama	0	1	1
255	Penyusun Rencana Pelayanan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	0	1	1
256	KEPALA CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ANAMBAS	1	1	0
257	Fungsional Pengawas Perikanan Ahli Muda	0	1	1
258	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	1	1	0
259	Fungsional Arsiparis Ahli Pertama	0	1	1
260	Fungsional Arsiparis Terampil	0	1	1
261	Pengadministrasi Umum	0	1	1
262	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	0	1	1
263	Penata Laporan Keuangan	0	1	1
264	Analisis Pengaduan Masyarakat	0	1	1
265	KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN KONSERVASI	1	1	0
266	Fungsional Pengawas Perikanan/Analisis Akuakultur Ahli Pertama	0	1	1
267	Fungsional Pengawas Perikanan Ahli Pertama	1	1	0
268	Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama	0	1	1
269	Analisis Konservasi dan Rehabilitasi Wilayah Pesisir	0	1	1
270	Pengadministrasi Identifikasi Pulau-Pulau Kecil	0	1	1
271	KEPALA SEKSI PELAYANAN USAHA	1	1	0
272	Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama	0	1	1
273	Penyusun Rencana Pelayanan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	0	1	1

2.2.3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana penunjang kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau secara bertahap terus ditingkatkan dari tahun ke tahun. Hingga Juli 2023, secara umum sarana prasarana yang dimiliki Dinas dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 2.2.D
SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG PEMBANGUNAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. KEPRI

No	URAIAN	SATUAN	JUMLAH	KONDISI		
				BAIK	RUSAK	RUSAK BERAT
	Tanah Bangunan Kantor					
1	Gedung Kantor Permanen	unit	7	7	-	-
2	Cold Storage	unit	2	2	-	-
3	Gudang	unit	5	5	-	-
4	Pabrik Es	unit	3	3	-	-
5	Terminal/Pelabuhan/Bandar	unit	7	2	-	5
6	Gedung Pos Jaga Permanen	unit	3	3	-	-
7	Laboratorium	unit	2	2	-	-
	Kendaraan					
1	Kapal Penangkap Ikan	unit	171			
2	Sepeda motor	unit	18			
3	Mobil	unit	7			
	Peralatan Kantor					
1	Meja Kerja	unit	302			
2	Kursi	unit	310			
3	Lemari	unit	59			
4	Laptop + Komputer	unit	45			
5	Printer	unit	60			
6	Meja Rapat	unit	16			
7	Kamera	unit	4			
8	Scanner	unit	10			
9	Infocus + Layar	unit	3			
10	Sound System	unit	2			
11	TV	unit	24			
12	Air Conditioning Unit	unit	33			

Selain sarana sebagaimana dijabarkan di atas, sarana kerja penunjang lain yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau adalah berupa sarana informasi portal berupa *web site* dengan alamat akses <http://dislautkan.kepriprov.go.id> dan Email: dkp@e-kepri.net Sarana informasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan layanan informasi pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Kepulauan Riau.

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

2.3.1. Sasaran/Target Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 dan Tahun 2021-2023

Indikator kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau selama 5 (lima) tahun terakhir mengacu pada sasaran strategis seperti yang ditentukan dalam Renstra sebelumnya. Terdapat 5 (lima) Sasaran Strategis meliputi:

1. Meningkatnya produksi perikanan dan pendapatan nelayan;
2. Meningkatnya Produksi olahan hasil kelautan dan perikanan;
3. Meningkatnya kualitas produk olahan hasil kelautan dan perikanan;
4. Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan sumber daya kelautan;
5. Terselenggaranya pengendalian, pengawasan & penegakan hukum.

Selain berdasarkan Sasaran Strategis, kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau juga mengacu pada indikator kinerja, sebagai berikut :

- a. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap;
- b. Nilai Tukar Nelayan (NTN) ;
- c. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya;
- d. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi);
- e. Jumlah produk olahan Hasil perikanan;
- f. Nilai Ekspor Hasil Perikanan (US\$);
- g. Peningkatan status kawasan konservasi perairan Level III;
- h. Produk peraturan perundang-undangan tentang pengaturan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
- i. Jumlah kasus Iuu Fishing / konflik pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang diselesaikan;
- j. Persentase kelompok (KUB,Poklahsar, Pokdakan) yang dibina disuluh.

Formulasi pengukuran kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan perbandingan antara realisasi terhadap target kuantitatif sasaran strategis, yaitu terhadap Indikator Kinerja pencapaian sasaran strategis tersebut. *Review* Pencapaian Kinerja Pelayanan DKP Provinsi Kepri dapat dilihat pada Tabel 2.3 dan Tabel 2.4.

Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan DKP Kepri Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2016-2020					Realisasi Capaian Tahun 2016-2020					Rasio Capaian (%) pada Tahun 2016-2020				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
I	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap																		
1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)				303,411.28	304.019,32	304.628,57	305.239,05	305.850,75	303.411,28	304.038,71	304.975,02	309.287,15	319.196,89	100	100,01	100,11	101,33	104,36
2	Nilai Tukar Nelayan (NTN) (%)				109.36	109.60	109,84	110,08	110,33	109,36	110,7	115,26	117,42	109,07	100	101	104,93	106,66	98,86
II	Program pengembangan dan pengelolaan Perikanan Budidaya																		
1	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)				33.582,65	33.649,95	33.717,38	33.784,95	33.852,66	33.582,65	34.302,00	34.399,86	33.003,11	21.421,10	100	101,94	102,02	97,69	63,28
2	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) (%)				107,28	107,52	107,75	107,99	108,23	107,28	107,23	108,20	126,77	101,63	100	99,73	100,42	117,39	93,90
III	Program Penguatan Daya Saing Hasil Perikanan																		
1	Jumlah produk olahan Hasil perikanan (ton)				1,318.30	1.320,94	1.323,58	1.326,23	1.328,88	1.318,30	1.902,48	1.336,82	1.803,55	6.205,90	100	144,02	101,00	135,99	467,00
IV	Program Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan																		
1	Nilai Ekspor Hasil Perikanan (US \$)				31,766,987	31.773.340	31.779.695	31.786.051	31.792.408	31.766,987	27.371.747	70.168.692	33.994.231,2	35.493.497	100	86,15	220,80	106,95	111,64
V	Program Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil																		
1	Peningkatan status kawasan konservasi perairan Level III (kawasan)				-	2	3	4	4	-	1	1	1	-	-	50,00	33,33	25,00	0
2	Produk peraturan perundang-undangan tentang pengaturan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan (Dokumen)				-	1	1	1	1	-	1	-	-	1	-	100	0	0	100
VI	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan																		
1	kasus IUU Fishing / konflik pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang diselesaikan (%)				100	100	100	100	100	100	89	100	100	100	100	89,00	100	100	100
VII	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan																		
2	Persentase kelompok (KUB,Poklahsar, Pokdakan) yang dibina Disuluh (%)				9,00	10,42	12,00	13,13	16,95	9,00	10,42	12,00	13,30	16,95	100	100	100	101,29	100
	RASIO CAPAIAN PER TAHUN														80	97,18	96,26	89,23	123,90

Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan DKP Kepri Tahun 2021-2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun 2021-2023			Realisasi Capaian Tahun 2021-2023			Rasio Capaian (%) pada Tahun 2021-2023		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
I	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil										
1	Kawasan konservasi yang dikelola	Kawasan	4	4	4	0	1	4	0,00	25,00	100,00
II	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap										
1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	306.463,67	307.076,60	307.690,60	303.190,89	322.107,00	320.391,79	98,93	104,89	104,13
2	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Nilai	110,57	115	115,5	112,67	112,58	104,14	101,90	97,90	90,16
III	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya										
1	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	33.920,50	26.491,92	28.473,50	22.339,00	27.436,03	31.250,00	65,86	103,56	109,75
1	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	Nilai	108,47	109,55	110,65	97,70	110,30	96,08	90,07	100,68	86,83
IV	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan										
2	Persentase kasus IUU Fishing /konflik pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang diselesaikan	%	90	90	90	100	100	100	111,11	111,11	111,11
V	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan										
1	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan	Ton	1.331,88	1.334,88	1.337,88	14.914,39	8.391,68	18.099,33	1119,80	628,65	1352,84
	RASIO CAPAIAN PER TAHUN								81,12	91,88	100,28

Berdasarkan tabel di atas, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau pada periode Renstra 2016-2020 rasio capaian kinerja mengalami kondisi inkonsistensi, dimana pada Tahun pertama yaitu 2016 rasio capaian kinerja sebesar 80% yang meningkat hingga Tahun 2017 menjadi 97%, namun mengalami penurunan rasio berturut-turut di Tahun 2018 dan 2019, yang selanjutnya pada Tahun 2020 berhasil mengalami peningkatan mencapai rasio 123,90%. Sedangkan pada Renstra Periode 2021-2026, sampai dengan Tahun 2023 rasio capaian kinerja berhasil menunjukkan tren kenaikan dari Tahun 2016 dari 81,12 sampai dengan 100,28

Selanjutnya, dalam pelaksanaan kinerja pelayanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau telah memperoleh berbagai pencapaian kurun waktu 2016-2023, sebagai berikut :

- a. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap
Capaian indikator Jumlah Produksi Perikanan Tangkap pada tahun 2023 sebesar 320.391,79 Ton. Angka tersebut berhasil melampaui target RPJMD tahun 2023 yaitu sebesar 307.690,60Ton. Dilihat dari tren peningkatan setiap tahunnya secara keseluruhan jumlah peningkatan produksi perikanan tangkap selama 8 tahun (2016-2023) rata-rata sebesar 5%.
- b. Nilai Tukar Nelayan (NTN)
Capaian indikator Nilai Tukar Nelayan pada tahun 2023 sebesar 104,14. Angka tersebut tidak berhasil mencapai target capaian pada Tahun 2023 yakni sebesar 112,58. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu harga ikan yang mengalami penurunan, biaya operasional yang semakin tinggi, hasil perikanan tangkap yang sulit untuk dijual karena terbatasnya akses transportasi yang berakibat turunnya permintaan produk perikanan tangkap. Namun demikian, secara keseluruhan pencapaian indikator mengalami penurunan dari Tahun 2016 hingga 2023 dengan rasio pencapaian sebesar 90,16 pada Tahun 2023
- c. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya
Capaian indikator Jumlah Produksi Perikanan Budidaya pada tahun 2023 sebesar 31.250,00 Ton. Angka tersebut belum mampu mencapai target RPJMD tahun 2023 yaitu sebesar 28.473,50 Ton. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu tadanya upaya memaksimalkan Kawasan budidaya di area ruang laut sebagaimana konsep klaster budidaya di Provinsi Kepulauan Riau, mulai digunakannya Budidaya Rumput laut dengan konsep industrialisasi dari hulu ke hilir, penambahan sarana dan prasarana budidaya yang meliputi Keramba Jaring Apung, benih serta pakan yang berkualitas serta penerapan teknik budidaya perikanan yang tepat dalam meminimalisir dampak pergantian musim (pancaroba) dan pengendalian terhadap hama penyakit ikan. Secara keseluruhan keberhasilan pencapaian indikator jumlah produksi budidaya tangkap selama 8 tahun (2016-2023) rata-rata sebesar 92,64%.
- d. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)
Capaian indikator Nilai Tukar Pembudidaya Ikan pada tahun 2023 sebesar 96,08. Angka tersebut tidak berhasil mencapai target capaian pada Tahun 2023 yakni sebesar 110,65. Hal ini disebabkan karena terjadinya inflasi pada beberapa komoditi budidaya, sehingga daya beli masyarakat menjadi berkurang pada beberapa sektor komoditi. Sehingga, secara keseluruhan pencapaian indikator Nilai Tukar Pembudidaya Ikan menunjukkan tren fluktuatif dari Tahun 2016 hingga 2023 dengan rasio capaian pada Tahun 2023 sebesar 86,83%.
- e. Jumlah Produk Olahan Hasil perikanan
Capaian indikator Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan pada tahun 2023 sebesar 18.099,33 Ton. Angka tersebut berhasil melampaui target RPJMD tahun 2023 yaitu sebesar 1.337,88 Ton. Berdasarkan hasil Analisa, peningkatan capaian jumlah produk olahan hasil perikanan Tahun 2022-2023 disebabkan karena berlakunya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2021 tentang Data Induk Produk Kelautan dan Perikanan yang juga

mengatur klasifikasi produk-produk hasil olahan perikanan. Dilihat dari tren peningkatan setiap tahunnya secara keseluruhan jumlah peningkatan produksi olahan hasil perikanan selama 5 tahun (2016-2023) rata-rata sebesar 100%.

- f. Nilai Ekspor Hasil Perikanan (US\$)
Capaian indikator Nilai Ekspor Hasil Perikanan pada tahun 2020 sebesar 35.493.497 US\$ Angka tersebut berhasil melampaui target RPJMD tahun 2020 yaitu sebesar 31.792.408 US Dilihat dari tren peningkatan setiap tahunnya secara keseluruhan Nilai Ekspor Hasil Perikanan selama 5 tahun (2016-2020) rata-rata sebesar 24%.
- g. Peningkatan Status Kawasan Konservasi Perairan Level III
Pada Tahun 2020, tidak terdapat realisasi pada indikator Peningkatan status kawasan konversi perairan Level III, hal ini disebabkan oleh pemberlakuan kebijakan *refocusing* pada Tahun 2020 dalam penanganan pandemi *Covid-19*, yang berdampak pada pemangkasan anggaran program/kegiatan pada seluruh Perangkat Daerah. Namun hingga Tahun 2020, telah terealisasi 3 kawasan peningkatan status kawasan konservasi perairan Level III.
- h. Produk peraturan perundang-undangan tentang pengaturan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
Pada Tahun 2020, telah terealisasi 1 dokumen peraturan peundang-undangan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sebagaimana target dalam RPJMD Tahun 2020. Dengan kondisi samapai dengan Tahun 2020, telah teresusun 2 dokumen perundag-undangan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Secara keseluruhan hasil ini belum mampu mencapai target akhir RPJMD yaitu sebanyak 4 dokumen.
- i. Jumlah Kasus Iuu Fishing / konflik Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Yang Diselesaikan.
Capaian indikator kasus Iuu Fishing / konflik pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang diselesaikan Tahun 2020 sebesar 100%. Angka tersebut berhasil mecapai target akhir RPJMD tahun 2020 yaitu sebesar 100%. Secara keseluruhan pencapaian indikator mengalami peningkatan dari Tahun 2016 hingga 2020 dengan rasio pencapaian sebesar 97,8 %.
- j. Persentase Kelompok (KUB,Poklahsar, Pokdakan) Yang dibina Disuluh.
Capaian indikator presentase kelompok (KUB, Poklahsar, Pokdakan) yang dibina disuluh Tahun 2020 sebesar 16,95%. Angka tersebut berhasil mecapai target akhir RPJMD tahun 2020 yaitu sebesar 16,9%. Secara keseluruhan pencapaian indikator indikator presentase kelompok (KUB, Poklahsar, Pokdakan) yang dibina disuluh mengalami peningkatan dari Tahun 2016 hingga 2020 dengan rasio pencapaian sebesar 100, 26 %.

2.3.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah alokasi anggaran baik anggaran program pembangunan maupun program rutin untuk pelaksanaan urusan kelautan dan perikanan selama tahun 2016-2020 sebesar Rp 254.764.695.707,28,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 231.040.605.464,83,- (90,69%). Uraian penjelasan realisasi anggaran dan kinerja per program diuraikan sebagai berikut.

1) Program Peningkatan dan Pengembangan Perikanan Budidaya

Alokasi anggaran selama lima tahun untuk pelaksanaan program ini sebesar Rp 24.712.702.739,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 23.634.351.085,13 (95,64%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk: Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Perikanan Budidaya; Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan; Kegiatan Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan;

Revitalisasi Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan; Kegiatan Pengembangan Budidaya Rumput Laut; Kegiatan Peningkatan Kapasitas Unit Perbenihan (UPTD Provinsi BBI Penghujan); Kegiatan Peningkatan Mutu Benih dan Sistem Budidaya Ikan.

2) Program Peningkatan dan Pengembangan Perikanan Tangkap

Alokasi anggaran selama lima tahun untuk pelaksanaan program ini sebesar Rp 75.037.185.384,88,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 62.399.562.738,98,- (83,16%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk: Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Perikanan Tangkap; Kegiatan Dukungan Pelayanan Perizinan Usaha Perikanan; Kegiatan Pengembangan Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan; Kegiatan Pengembangan Kapal Perikanan; Kegiatan Pengelolaan Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil; Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Pelabuhan Perikanan; Kegiatan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai (P3 Antang); Kegiatan Operasional Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Antang; dan Kegiatan Pelaksanaan Anambas Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan

3) Program Penguatan Daya Saing Hasil Perikanan

Alokasi anggaran selama lima tahun untuk pelaksanaan program ini sebesar Rp 2.544.290.889,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.486.569.927,97,- (97,73%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk: Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; Kegiatan Promosi dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan; dan Kegiatan Sarana dan Prasarana Hasil Perikanan.

4) Program Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Alokasi anggaran selama lima tahun untuk pelaksanaan program ini sebesar Rp 5.950.529.870,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 5.791.183.768,- (97,32%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk: Kegiatan Pengembangan Sistem Jaminan Mutu Hasil Perikanan; Operasional UPTD Balai Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan (BPMPPKP); dan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan.

5) Program Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Alokasi anggaran selama lima tahun untuk pelaksanaan program ini sebesar Rp 8.747.900.603,00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 7.755.863.280,00,- (88,66%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk: Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Program COREMAP CTI; Kegiatan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (RZWP3K); dan Kegiatan Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut.

6) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Alokasi anggaran selama lima tahun untuk pelaksanaan program ini sebesar Rp 32.313.905.227,52,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 26.271.700.736,75,- (81,30%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk: dan Kegiatan Pengawasan dan Penertiban Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; Kegiatan Penyelesaian Tindak Pindana Kelautan dan Perikanan.

7) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan

Alokasi anggaran selama lima tahun untuk pelaksanaan program ini sebesar Rp 9.986.991.799,00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 9.135.748.306,00,- (91,48%),

dan realisasi fisik sebesar 100%. Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk: Kegiatan Pendamping Perikanan Lapangan; Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran; Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan; Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung; Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran; Kegiatan Operasional Kantor Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Kepri di Bintan; Kegiatan Operasional Kantor Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Kepri di Batam; Kegiatan Operasional Kantor Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Kepri di Karimun; Kegiatan Operasional Kantor Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Kepri di Lingga; Kegiatan Operasional Kantor Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Kepri di Anambas; Kegiatan Operasional Kantor Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Kepri di Natuna.

8) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Alokasi anggaran selama lima tahun untuk pelaksanaan program ini sebesar Rp 844.087.013,00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 834.875.265,00,- (98,91%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

9) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Alokasi anggaran selama lima tahun untuk pelaksanaan program ini sebesar Rp 235.074.246,00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 205.139.269,00,- (87,27%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk: Kegiatan Pelaksanaan SAKIP Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri.

10) Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat

Alokasi anggaran selama lima tahun untuk pelaksanaan program ini sebesar Rp 260.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 258.364.000,- (99,37%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk: Kegiatan Peringatan Hari nusantara.

11) Program penyusunan dan publikasi data/informasi

Alokasi anggaran selama lima tahun untuk pelaksanaan program ini sebesar Rp 460.803.395,00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 451.927.088,00,- (98,07 %), dan realisasi fisik sebesar 100 %. Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk: Kegiatan Publikasi Kegiatan Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri.

12) Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Alokasi anggaran selama lima tahun untuk pelaksanaan program ini sebesar Rp 2.286.841.182,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.232.312.026,- (97,62%), dan realisasi fisik sebesar 100%. Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk: Kegiatan Forum koordinasi dan sinkronisasi pembangunan kelautan dan perikanan provinsi kepulauan riau; Kegiatan Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan; dan Kegiatan Penyusunan/ kajian dokumen pendukung perencanaan Pembangunan Sektor Unggulan Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau

Selanjutnya, untuk jumlah alokasi anggaran baik anggaran untuk pelaksanaan urusan kelautan dan perikanan selama tahun 2021-2023 sebesar Rp216.117.524.024,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp203.639.869.409,76 (94,23%). Uraian penjelasan realisasi anggaran dan kinerja per program diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.5. Realisasi Anggaran Tahun 2021-2023

NO	PROGRAM	2021			2022			2023		
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	31.626.853.053,00	28.831.990.777,70	91,16	Rp34.855.792.559,00	Rp34.157.358.379,00	98,00	34.127.729.719	33.210.484.324	97,31
2	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	4.545.235.155,00	3.624.716.682,16	79,75	Rp193.182.800,00	Rp138.609.120,00	71,75	2.540.883.151	2.318.034.046	91,23
3	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	24.440.189.785,00	23.288.317.831,59	95,29	Rp20.669.630.942,00	Rp20.121.596.778,19	97,35	16.630.557.233	16.453.730.925,35	98,94
4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	14.319.428.560,00	12.274.426.757,00	85,72	Rp8.606.823.764,00	Rp8.300.600.172,17	96,44	6.698.101.685	6.480.031.537,70	96,74
5	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	6.433.627.279,00	4.660.189.419,90	72,43	Rp1.447.000.233,00	Rp1.419.027.147,00	98,07	3.903.425.684	3.848.130.796,00	98,58
6	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.536.647.085,00	1.087.829.559,00	70,79	Rp2.848.703.435,00	Rp2.753.529.763,00	96,66	693.711.902	671.265.394,00	96,76
	TOTAL	82.901.980.917,00	73.767.471.027,35	88,98%	68.621.133.733,00	66.890.721.359,36	97,48%	64.594.409.374,00	62.981.677.023,05	97,50%

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Tantangan yang dihadapi dan peluang yang ada untuk mengembangkan pelayanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau meliputi aspek sumber daya alam, kondisi geografis, ekonomi, pasar, industri, payung hukum serta dukungan pemerintah, yang mana keseluruhan aspek tersebut saling terkait menjadi sebuah dinamika yang telah berjalan selama ini, yang pada akhirnya sistem dimaskud diharapkan mampu menghasilkan suatu upaya untuk menyikapi kekurangan menjadi kekuatan serta tantangan menjadi peluang untuk mengoptimalkan sektor kelautan dan perikanan lebih berkontribusi dalam memajukan Provinsi Kepulauan Riau.

2.4.1. Peluang

Peluang (*opportunity*) adalah kondisi eksternal yang mendukung dan dapat dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Apabila dikelompokkan, maka peluang (*opportunity*) terdiri dari peluang sumberdaya alam dan kondisi geografis, peluang ekonomi dan pasar, peluang dukungan pemerintah.

Peluang Sumber daya Alam dan Kondisi Geografis:

- (1) Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan Provinsi Kepri belum termanfaatkan secara optimal;
- (2) Provinsi Kepulauan Riau terletak pada posisi strategis (alur pelayaran dan perdagangan internasional);
- (3) Kewenangan wilayah laut Kepulauan Riau (0-12 mil) seluas 101.920 Km² berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Peluang Ekonomi, Pasar dan Industri:

- (1) Tingginya permintaan ikan baik untuk memenuhi pasar dalam negeri maupun untuk ekspor serta pertumbuhan usaha perikanan rakyat ke usaha perikanan maju seiring dengan naiknya pamor perikanan sebagai sumberdaya pangan unggulan;
- (2) Adanya kebijakan pengembangan usaha Perikanan secara lebih sistemik serta memberdayakan usaha-usaha perikanan skala kecil;
- (3) Peran pelaku usaha perikanan yang semakin meningkat dan proaktif, serta iklim dunia usaha yang semakin kondusif (termasuk aspek finansial, perbankan dan investasi);
- (4) Pengembangan klaster usaha pengolahan hasil perikanan dalam bentuk UKM (Usaha Kecil dan Menengah) yang berbasis pada produk bernilai tambah dan memenuhi selera pasar;
- (5) Peluang investasi pada bidang usaha pengolahan dan pemasaran dengan keunggulan jenis dan kualitas produk
- (6) Penyajian data dan informasi sumberdaya, sarana dan prasarana serta jaringan usaha di bidang kelautan dan perikanan Provinsi Kepri;
- (7) Globalisasi/diberlakukannya pasar bebas membuka peluang pengembangan pemasaran hasil perikanan;

Peluang Dukungan Pemerintah :

- (1) Komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan bidang Kelautan dan Perikanan, memberikan peluang untuk meningkatkan kinerja di sektor kelautan dan perikanan;
- (2) Adanya lembaga pemerintahan yang menangani sampai tingkat Kabupaten/Kota yang didukung *stakeholders*, termasuk di dalamnya kekayaan/Aset Barang Daerah dalam lingkup Kelautan dan Perikanan seperti: pelabuhan perikanan, sentra budidaya, pusat informasi dan jejaring usaha serta pariwisata.
- (3) Adanya regulasi dibidang kelautan dan perikanan

2.4.2. Tantangan

Tantangan (*threat*) adalah kondisi eksternal yang dapat mengganggu dan menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Apabila dikelompokkan, maka ancaman (*threat*) terdiri dari tantangan alam; tantangan Ekonomi, Pasar dan Industri; tantangan globalisasi; serta tantangan koordinasi dan penanganan lintas sektor.

Tantangan Alam :

- (1) Menurunnya kualitas lingkungan hidup yang memberikan tekanan terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan;
- (2) Kondisi geografis Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari 2.408 buah pulau dengan pola tersebar, 19 pulau terdepan dan panjang Garis Pantai 8.561,33 Km;
- (3) Adanya degradasi wilayah pesisir seiring penambahan jumlah penduduk;
- (4) Menurunnya kualitas pesisir akibat intensifnya aktivitas nelayan yang berdomisili di kawasan pesisir;
- (5) Maraknya reklamasi wilayah pesisir untuk pengembangan wilayah yang berakibat menurunnya kualitas sumberdaya wilayah pesisir pada umumnya.

Tantangan Ekonomi, Pasar dan Industri:

- (1) Banyaknya kasus IUU Fishing di wilayah Kepulauan Riau ;
- (2) Belum meratanya pembangunan ekonomi wilayah pesisir;
- (3) Lemahnya permodalan dalam menunjang usaha perikanan terutama usaha kecil dan menengah;
- (4) Kuota BBM bersubsidi bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan masih terbatas;
- (5) Industri Hilir Perikanan belum berkembang secara optimal;
- (6) Belum konsistennya akses pasar yang dimiliki oleh pelaku usaha perikanan;
- (7) Rendahnya jumlah dan jenis produk olahan hasil perikanan serta ekspor hasil perikanan.

Tantangan Globalisasi:

- (1) Teknologi pengolahan perikanan yang belum terstandar ekspor;
- (2) Berlakunya pasar terbuka Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA);
- (3) Penerapan standar ekspor bagi tiap negara dengan standar yang berbeda.

Tantangan Koordinasi dan Penanganan Lintas Sektor:

- (1) Lemahnya penegakan hukum dan rawannya konflik antar kepentingan, sehingga perlu dilakukan revitalisasi dan pembinaan/ sosialisasi peraturan perundang-undangan Perikanan;
- (2) Adanya regulasi yang tumpang tindih tentang perizinan perikanan;
- (3) Perlu adanya undang-undang tentang Perlindungan Nelayan khusus wilayah Kepulauan Riau;
- (4) Perlu adanya integrasi antara peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khusus tentang sektor kelautan dan perikanan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN



- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan DKP Kepulauan Riau
- 3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala / Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaah Renstra KKP RI dan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau
- 3.4. Telaah RTRW dan KLHS
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dilakukan guna melihat kondisi semua aspek yang terkait dengan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan beserta perkembangannya beberapa tahun ini terutama menyangkut pelayanan publik dan tanggung jawab dalam upaya mewujudkan pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Identifikasi ini berguna untuk melihat sampai dimana posisi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau saat ini dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melayani masyarakat dan langkah-langkah apa yang perlu dilakukan dimasa yang akan datang untuk mempertahankan keberhasilan dan meminimalisir kegagalan.

Meskipun berdasarkan realisasi capaian kinerja layanan yang selama 5 (lima) tahun terakhir telah mampu memenuhi beberapa target yang telah ditetapkan, namun masih banyak permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan bidang kelautan dan perikanan. Pengelolaan kelautan dan perikanan memiliki permasalahan yang kompleks karena keterkaitannya dengan banyak sektor dan juga sensitif terhadap interaksi terutama dengan aspek lingkungan yang berpotensi mengancam kelestarian sumber daya ikan dan keberlanjutan mata pencaharian masyarakat perikanan, serta pertumbuhan ekonomi daerah.

TABEL 3.1
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KEPULAUAN RIAU

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Belum Optimalnya Pemanfaatan Potensi Ruang Laut	Pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang berdampak pada pemanfaatan ruang laut yang belum optimal	Kurangnya dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka optimalisasi industri perikanan dan kelautan
2	Masih Terdapat <i>Illegal fishing, unregulated fishing</i> dan <i>unreported fishing</i>	Pada Tahun 2020 terdapat 28 kasus <i>illegal fishing</i> yang berpengaruh pada produksi perikanan tangkap yang terealisasi sebesar 319.196,89 Ton pada tahun 2020 dari jumlah potensi yang dapat dimanfaatkan sebesar 1.057.050 Ton/tahun (30,20% termanfaatkan)	<div>Kurangnya pembinaan dan sosialisasi kepada pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil tentang peraturan terkait kelautan dan perikanan</div> <div>Masih rendahnya tingkat kesadaran pelaku usaha perikanan untuk melaporkan dan melegalkan aktifitas usaha yang dijalankannya</div>
3	Perlunya dukungan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya	Dalam aktivitas menangkap ikan, para nelayan Kepulauan Riau mayoritas masih menggunakan armada yang tradisional, yang cenderung berbahaya dan dapat merusak padang lamun serta terumbu karang	<div>Masih rendahnya dukungan Pemerintah dalam memberikan bantuan alat tangkap yang sesuai standar maupun peningkatan kapasitas nelayan terhadap teknologi kelautan dan perikanan</div> <div>Sumber Daya Manusia atau pelaku utama pengolahan dan pemasaran perikanan masih belum modern</div>
4	Kesejahteraan nelayan belum maksimal	Kemampuan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap manajemen usaha dan teknologi terkini dalam rangka pengembangan usahanya masih sangat rendah	<div>Kurangnya pelatihan manajemen dan pelatihan peningkatan kapasitas nelayan, pembudidaya ikan dan pengolahan serta pemasar hasil perikanan.</div> <div>Belum optimalnya kualitas dan kemampuan nelayan dalam membudidaya dan mengolah hasil perikanan terutama dalam hal diversifikasi hasil olahan produk perikanan</div>
5	Infrastruktur Bidang Kelautan dan Perikanan masih perlu pembenahan	Pola monopsoni yang masih berlaku dalam rantai pemasaran perikanan	<div>Kurangnya infrastruktur penunjang bidang kelautan dan perikanan seperti jalan, air bersih, pelabuhan perikanan, serta pabrik</div> <div>Masih adanya hambatan dalam proses rantai pasok pemasaran perikanan</div>

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
6	Peningkatan status Kawasan Konservasi belum maksimal	Capaian peningkatan status Kawasan Konservasi perairan level 3 saat ini baru tercapai 1 kawasan dari target 4 kawasan pada tahun 2019	Adanya perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Perubahan mengenai level kawasan, sehingga data serta persyaratan yang harus dilengkapi perlu disesuaikan kembali
			Kurangnya pemanfaatan sumber daya alam secara ekonomis, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
7	Belum Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Baik Aspek Permodalan Maupun Pemasaran	Masih kurangnya pendampingan dan pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah	Tingkat pendidikan masyarakat (nelayan) saat ini masih tergolong rendah

3.2. TELAAH VISI, MISI, DAN PROGRAM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

Rencana Strategis adalah bentuk operasionalisasi dari RPJMD Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan penjabaran terhadap Visi, Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau terpilih. Dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih telah menetapkan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan Visi yang ingin dicapai yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 3 (tiga) tahun sesuai misi yang diemban. Visi Provinsi Kepulauan Riau periode 2021-2024 adalah : ***"Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya"***.

Visi Provinsi Kepulauan Riau tersebut selanjutnya dapat dimaknai sebagai berikut:

- Makmur** : Kehidupan masyarakat Kepulauan Riau yang lebih layak dan sejahtera
- Berdaya Saing** : Terwujudnya masyarakat yang sehat, birokrasi pemerintahan dan dunia usaha yang lebih mampu bersaing dan unggul di tingkat regional dan internasional.
- Berbudaya** : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pembangunan dan aktivitas masyarakat Kepulauan Riau yang lebih berpegang pada nilai-nilai agama, budaya Melayu dan budaya Nasional

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026 merumuskan dan menetapkan 5 (lima) misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. **Percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis maritim dan keunggulan wilayah untuk peningkatan kemakmuran masyarakat.**
2. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan
3. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasis Iman dan Taqwa.
4. Mengembangkan dan melestarikan budaya melayu dan budaya nasional dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.
5. Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan.

Adapun uraian ke-5 (kelima) Misi, tujuan, dan sasaran Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau, diuraikan sebagai berikut :

- Misi ke-1 : Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat. Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau. Upaya tersebut dilakukan dengan kembali memulihkan perekonomian Kepulauan Riau yang sempat terjatuh cukup dalam akibat Covid-19. Upaya tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan dan mengandalkan potensi daerah yang dimiliki sebagai sumber daya pembangunan Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan Riau yang secara demografis sebagai daerah maritim dengan potensi laut yang besar tentu menjadi suatu modal penting yang dapat digunakan dalam pembangunan ekonomi. Di sisi lain, berbagai potensi lainnya seperti perindustrian, pariwisata dan lain-lain yang akan dikelola secara maksimal sehingga hal tersebut akan memberikan dampak

yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kemakmuran masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.

Misi ke-2 : Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mencapai pemerintahan yang bersih, terbuka, dan berorientasi pelayanan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kinerja pemerintahan dapat berjalan dengan stabil dan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Untuk memastikan kedua hal tersebut dapat dicapai maka langkah yang ditempuh melalui perwujudan keterbukaan informasi, pemerintahan yang bebas KKN, dan pemerintahan yang tanggap, tangkas, dan tangguh. Selain itu, untuk menunjang pelaksanaan hal tersebut maka kualitas dan penempatan pegawai yang sesuai juga menjadi fokus lainnya yang akan dibenahi.

Misi ke-3 : Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasis Iman dan Taqwa.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini juga tidak terlepas dari pengaruh Era Globalisasi yang menuntut SDM yang bisa bersaing dalam hal keahlian dan kompetensi yang dimiliki. Upaya untuk menjawab tantangan tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas, kesehatan, dan daya saing SDM. Namun demikian, pembangunan manusia tersebut tidak hanya ditekankan pada pengembangan kualitas dan daya saing tetapi juga dengan menjadikan nilai-nilai iman dan takwa sebagai nilai fundamental dalam pembangunan manusia. Oleh karena itu, tujuan pembangunan manusia dalam misi ini dimaksudkan agar SDM di Kepulauan Riau memiliki jaring pengaman sosial yang memadai dan menjadi SDM yang unggul dan berkarakter.

Misi ke-4 : Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mengembangkan dan melestarikan budaya Melayu dalam Pembangunan. Budaya Melayu merupakan pilar penting dalam kehidupan bermasyarakat yang perlu dijaga kelestariannya. Budaya Melayu sebagai suatu filosofi hidup masyarakat Kepulauan Riau pernah mengantarkan Kepulauan Riau menjadi daerah maju dengan kehidupan masyarakat yang makmur. Upaya pelestarian budaya Melayu ini dimaksudkan untuk menjaga filosofi hidup masyarakat Kepulauan Riau tetap terjaga sehingga tidak tergerus oleh zaman. Di sisi lain, kemajemukan masyarakat Kepulauan Riau menjadi modal sosial tersendiri dalam beragama, berkebudayaan dan bermasyarakat. Oleh karena itu, untuk mempekerat hal tersebut maka keselarasan, keserasian, dan toleransi antar umat beragama, suku, dan etnis menjadi pilar penting yang harus dijaga dan dilestarikan melalui penguatan nilai-nilai budaya nasional di masyarakat

Misi ke-5 : Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mempercepat pembangunan infrastruktur antar pulau untuk mengintegrasikan dan mempercepat pembangunan kawasan pesisir. Masih terjadinya ketimpangan pembangunan antar pulau, transportasi yang terbatas serta infrastruktur dasar yang minim menyebabkan pergerakan ekonomi yang lambat serta kualitas ekonomi yang buruk. Hal tersebut dapat terselesaikan dengan pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, pelabuhan, akses transportasi antar pulau dan juga pembangunan air bersih, listrik, dan jaringan telekomunikasi yang dapat menjangkau setiap daerah.

Berdasarkan identifikasi Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, Dinas Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kepulauan Riau mendukung dan berkontribusi dalam pelaksanaan Misi ke-1 (Pertama) yaitu **“Percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis maritim dan keunggulan wilayah untuk peningkatan kemakmuran masyarakat”**.

Dalam rangka mendukung Misi ke-1 sebagaimana dimaksud, Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki 5 (lima) program prioritas dalam rangka pembangunan bidang kelautan dan perikanan yang telah dituangkan pada Renstra Dinas Tahun 2021-2026, yang terdiri atas :

1. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
4. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
5. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; serta

1 Program pendukung, yaitu : Program Penunjang Urusan Pemerintahan dengan indikator program berupa nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.

Untuk lebih jelasnya telaahan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau berkaitan Visi, Misi, dan Program Pembangunan Daerah dalam Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 disajikan dalam tabel berikut :

TABEL 3.2
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TERHADAP PENCAPAIAN VISI, MISI DAN PROGRAM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

VISI : “TERWUJUDNYA KEPULAUAN RIAU YANG MAKMUR, BERDAYA SAING, DAN BERBUDAYA”				
NO	MISI DAN PROGRAM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi ke-1 : Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan			
	Indikator Tujuan ke-1 : Optimalisasi Potensi Kemaritiman, Keunggulan Wilayah, dan Keberlanjutan Lingkungan dengan Program : 1. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 4. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 5. Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Masih rendahnya optimalisasi sektor kelautan dan perikanan	1. Adanya perubahan regulasi/ peraturan tentang pengelolaan pesisir 2. Penggunaan alat tangkap berbahaya sehingga merusak padang lamun/terumbu karang	1. Adanya kebijakan penganggaran terhadap bantuan Sarpras produksi berbasis kelompok usaha perikanan 2. Intensitas pembinaan dan pendampingan kelompok perikanan dalam rangka peningkatan SDM
			1. Kurang akuratnya data oseanografi terkait peralihan musim 2. belum optimalnya data nelayan penerima manfaat	1. Masih tingginya potensi perikanan budidaya 2. Intensitas kegiatan terhadap peningkatan kapasitas SDM dan sarpras perikanan
			1. masih rendahnya tingkat kesadaran pelaku usaha perikanan 2. Kurangnya ketersediaan BBM bersubsidi 3. Nelayan kurang menggunakan teknologi dalam penangkapan ikan	1. Masih berlimpahnya potensi perikanan tangkap
			1. Masih Rendahnya Daya Saing Produk Olahan Hasil Perikanan 2. Masih Penerapan Standarisasi Mutu Produk Olahan Hasil Perikanan	1. Pasar global dan regional sangat terbuka untuk konsumsi produk perikanan
			1. Masih adanya illegal fishing dan unregulated fishing dan unreported fishing	1. Adanya dukungan dari Pemerintah mauoun Pemerintah Pusat dalam bentuk Program Kerja

VISI : “TERWUJUDNYA KEPULAUAN RIAU YANG MAKMUR, BERDAYA SAING, DAN BERBUDAYA”

NO	MISI DAN PROGRAM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Misi ke-2 : Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan			
	Indikator Tujuan ke-2 : Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat, dan Antisipatif dengan Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1. Pengelolaan Kinerja Reformasi Birokrasi belum optimal dan belum sepenuhnya dipahami oleh semua pihak; 2. Manajemen SAKIP perlu ditingkatkan lagi untuk menjadi lebih baik	1. Masih belum optimalnya kuantitas SDM Aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan dan pemahaman pentingnya Reformasi Birokrasi; 2. Dokumen perencanaan kinerja dan pengelolaan SAKIP perlu ditingkatkan lagi	1. Lahirnya berbagai kebijakan terkait Reformasi Birokrasi & Pengembangan Kapasitas Aparatur 2. Terbukanya akses terhadap teknologi informasi

3.3. TELAAH RENSTRA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (KKP) RI

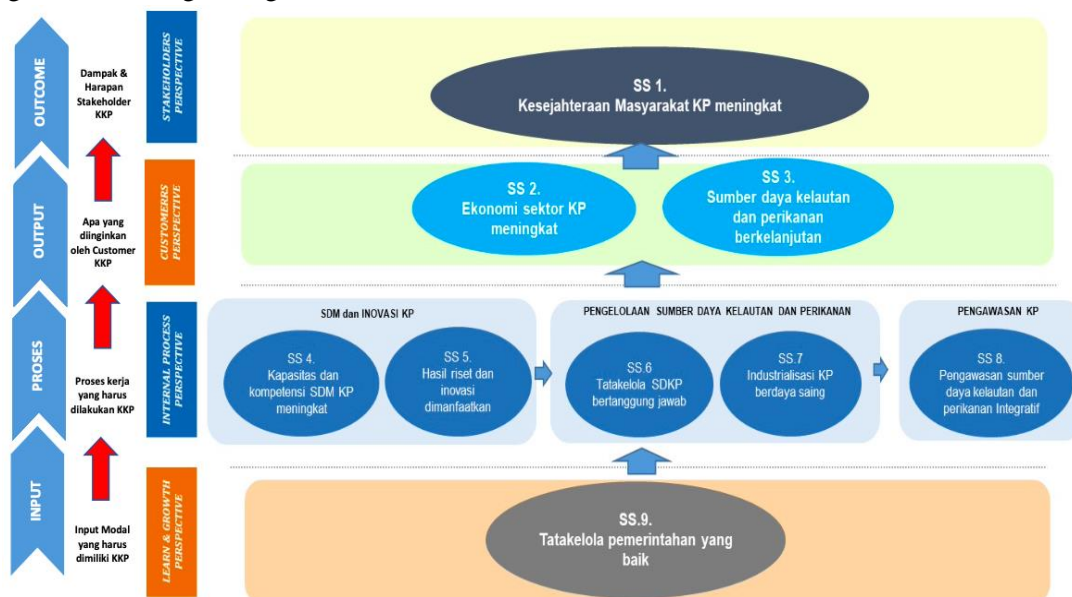
Salah satu misi pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan adalah Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Maritim yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk membidangi urusan kelautan dan perikanan, maka Visi KKP Tahun 2020-2024 ditetapkan selaras dengan visi pembangunan nasional serta bertujuan untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Visi KKP adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan kepada KKP dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka terdapat 4 pilar yang menjadi misi KKP yaitu :

1. **Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia**, melalui Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan
2. **Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing**, melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional.
3. **Mencapai Lingkungan Hidup yang berkelanjutan**, melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
4. **Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya**, melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dalam penyusunan Peta Strategi, KKP menggunakan empat perspektif yaitu *stakeholders perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*, dengan Peta Strategi sebagai berikut :



Sumber : Rencana Strategis (Renstra) KKP Tahun 2020-2024

Berdasarkan gambar di atas, Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan 9 (sembilan) Tujuan dan 9 (sembilan) Sasaran Strategis (SS). Adapun dari 9 (sembilan) sasaran strategis (SS) pada Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024, terdapat 5 (lima) sasaran yang bersinergi dengan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, yaitu :

- SS-2. Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat, dengan indikator kinerja, yaitu : pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan dari 7,9% pada tahun 2020 menjadi 8,71% pada tahun 2024
- SS-3. Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan, dengan indikator kinerja luas kawasan konservasi perairan, dari 23,40 juta Ha pada tahun 2020 menjadi 26,90 juta Ha pada tahun 2024
- SS-4. Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat, dengan indikator kinerja kelompok pelaku utama/usaha yang ditingkatkan kelasnya, setiap tahun minimal sebanyak 1.500 kelompok per tahun selama tahun 2020-2024
- SS-7. Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing, dengan 4 indikator kinerja, yaitu : produksi perikanan, dari 26,46 juta ton (produksi ikan 15,47 juta ton dan rumput laut 10,99 juta ton) pada tahun 2020 menjadi 32,75 juta ton (produksi ikan 20,42 juta ton dan rumput laut 12,33 juta ton) pada tahun 2024
- SS-8. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif, dengan indikator kinerja persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan illegal fishing, dari 54% pada tahun 2020 menjadi 75% pada tahun 2024

Dalam RPJMN 2020-2024 terdapat 3 (tiga) *major project* terkait dengan pembangunan bidang kelautan dan perikanan yaitu :

1. Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng.
2. Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Pasar Ikan (*Fish Market*) Bertaraf Internasional.
3. Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan.

Berdasarkan uraian umum terhadap Renstra KKP 2020-2024 di atas, maka faktor penghambat dan pendorong yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau untuk mendukung Visi dan Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan disajikan pada tabel berikut ini :

TABEL 3.3
PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU BERDASARKAN SASARAN RENSTRA KKP TAHUN 2020 – 2024 DAN FAKTOR PENGHAMBAT SERTA PENDORONG

NO	SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA KKP	PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS PERIKANAN	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	(SS-2) Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat Indikator : Pertumbuhan PDB Perikanan dari 7,9% (tahun 2020) menjadi 8,71% (tahun 2024).	1. Produksi perikanan serta produk hasil olahan perikanan belum optimal 2. Produktivitas dan daya saing produksi perikanan masih rendah	1. Sarana dan prasarana pendukung produksi dan sarana dan teknologi pengolahan masih terbatas 2. Aspek pasar, SDM, Prasarana dan teknologi yang belum memadai 3. Ketersediaan infrastruktur pengolahan perikanan belum memadai	1. Potensi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sangat besar 2. Kebutuhan masyarakat dunia terhadap produk perikanan sangat besar 3. Akses pasar perikanan yang sangat terbuka
2.	(SS-3) Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan Indikator : Luas kawasan konservasi perairan, dari 23,40 juta Ha pada tahun 2020 menjadi 26,90 juta Ha pada tahun 2024	1. Kawasan konservasi level 3 saat ini yang baru tercapai 1 kawasan dari target 4 kawasan sampai Tahun 2021	1. Perubahan regulasi/ peraturan berdampak pada kewenangan dan persyaratan penetapan kawasan konservasi	1. Arah kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah dalam upaya perluasan kawasan konservasi
3.	(SS-4) Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat Indikator : Kelompok pelaku utama/usaha yang ditingkatkan kelasnya, setiap tahun minimal sebanyak 1.500 kelompok per tahun selama tahun 2020-2024.	1. Kualitas Kelembagaan Nelayan, Pembudidaya & Pengolah serta Kesenjangan Gender dalam kelembagaan kelompok yang belum optimal	1. Kelompok pelaku usaha kelautan dan perikanan belum terbentuk badan hukum korporasi/ Perusahaan 2. Rendahnya kesadaran berkelompok dan kemandirian kelompok perikanan	1. Pembinaan dan pendampingan kelompok perikanan dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan , kompetensi dan pemberdayaan masyarakat

NO	SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA KKP	PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS PERIKANAN	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	(SS-7) Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing Indikator : produksi perikanan, dari 26,46 juta ton (produksi ikan 15,47 juta ton dan rumput laut 10,99 juta ton) pada tahun 2020 menjadi 32,75 juta ton (produksi ikan 20,42 juta ton dan rumput laut 12,33 juta ton) pada tahun 2024	1. Produksi Perikanan Tangkap masih rendah dibanding dengan potensi yang ada 2. Produksi Perikanan Budidaya relatif masih rendah dibanding dengan potensi yang ada 3. Masih rendahnya produk olahan dan diversifikasi produk olahan hasil perikanan	1. Rendahnya Kompetensi SDM perikanan 2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Usaha Produksi 3. Rendahnya produktifitas produksi dari kelompok usaha perikanan. 4. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan 5. Masih terbatasnya sarana prasarana pengolahan hasil perikanan	1. Potensi perikanan tangkap dan budidaya yang masih tinggi dan belum dimanfaatkan secara optimal 2. Arah kebijakan Pemerintah daerah terhadap penyediaan sarpras produksi perikanan 3. Intensitas kegiatan terhadap peningkatan kapasitas SDM dan sarpras perikanan 4. Dukungan Pemerintah dalam penanggulangan <i>destructive fishing</i> dan <i>illegal fishing</i>
5.	(SS-8) Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integrative Indikator : kinerja persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan illegal fishing, dari 54% pada tahun 2020 menjadi 75% pada tahun 2024	1. Masih terdapat Permasalahan kasus <i>illegal fishing</i> (Tahun 2020 : 28 kasus)	1. Sumber Daya Manusiis dan Armada pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan masih terbatas	1. Upaya Perlindungan terhadap sumber daya kelautan dan perikanan (<i>illegal, unregulated, unreported fishing</i>) dan perlindungan terhadap masyarakat pesisir masih terus dilakukan

3.4. TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

3.4.1. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)

Berdasarkan telaah terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Riau periode 2017-2037, bahwa pengembangan sektor kelautan dan perikanan diprioritaskan di wilayah pesisir. Pusat-pusat kegiatan sektor perikanan yang telah ditetapkan tersebut terbagi atas Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) serta pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL).

Analisis/telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepulauan Riau yang kemudian dijadikan rekomendasi dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 adalah sebagaimana terlihat pada tabel 3.4.

TABEL 3.4
PEMETAAN RENCANA ZONASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Fungsi	Kota	Arahan
PKSN	Ranai	- Kawasan pengembangan industri pendukung perikanan dan kelautan.
PKSN/PKW	Tarempa	- Sentra produksi perikanan dan kelautan. - Pengembangan industri pendukung dan pengolahan perikanan.
PKW	Daik Lingga	- Sentra pengembangan kegiatan pertanian/ perkebunan, perikanan, dan kehutanan
	Dabo-Pulau Singkep	- Kegiatan pertanian/perkebunan, perikanan, kehutanan, pertambangan dan pariwisata.
	Tanjungbalai Karimun	- Pengembangan industri pengolahan hasil pertambangan, perikanan dan kelautan.
	Dabo-Pulau Singkep	- Kegiatan pertanian/perkebunan, perikanan
	Tanjungbalai Karimun	- Pengembangan industri pengolahan hasil pertambangan, perikanan dan kelautan.
PKL	Kijang	- Kawasan pertanian dan perikanan.
	Letung	- Pusat koleksi dan distribusi hasil perikanan dan kelautan. - Kawasan industri perikanan dan kelautan.
	Tebangladan	- Pusat koleksi dan distribusi hasil perikanan dan kelautan. - Pusat industri pengolahan perikanan dan kelautan
	Pancur	- Kawasan perikanan dan kelautan.
	Senayang	- Pusat koleksi dan distribusi hasil perikanan serta kelautan. - Kawasan pertanian, perkebunan dan perikanan.
	Tanjung Batu	- Kawasan pariwisata, pertanian, perkebunan dan perikanan.
	Moro	- Pusat kegiatan perikanan.
	Sedanau	- Pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian, perkebunan dan perikanan.
	Midai	- Pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian, perikanan, dan perkebunan (cengkeh)
	Pulau Tiga	- Pusat pengembangan sentra perikanan
	Tambelan	- Pusat pengembangan sentra perikanan dan pertanian

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 6/KEPMEN-KP/2018 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional (RIPPN), dijelaskan bahwa pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan

batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, disebutkan bahwa pelabuhan perikanan diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelas, yaitu:

1. Pelabuhan Perikanan Kelas A, disebut Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS), mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), dan laut lepas.
2. Pelabuhan Perikanan Kelas B, disebut Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia dan ZEEI.
3. Pelabuhan Perikanan Kelas C, disebut Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP), mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia.
4. Pelabuhan Perikanan Kelas D, disebut Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia.

Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang RTRW Provinsi Kepulauan Riau Periode 2017-2037, bahwa pelabuhan perikanan yang secara tegas tercantum dalam RTRW hanya 2 pelabuhan yaitu :

1. Pelabuhan Perikanan Parit Rempak Kabupaten Karimun (PPI).
2. Pelabuhan Perikanan Buru Kabupaten Karimun

Sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 45/KEPMEN-KP/2014 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional (RIPPN), pelabuhan perikanan di Provinsi Kepulauan Riau yaitu sebanyak 19 pelabuhan perikanan (PP) yang akan :

1. PP. Antang di Tarempa – Anambas (PPP)
2. PP. Jemaja – Anambas (PPI)
3. PP. Kuala Maras – Anambas (PPI)
4. PP. Nyamuk – Anambas (PPI)
5. PP. Air Sena – Anambas (PPI)
6. PP. Kiabu – Anambas (PPI)
7. PP. Kijang – Bintan (PPI)
8. PP. Batu Duyung – Bintan (PPI)
9. PP. Moro – Karimun (PPI)
10. PP. Parit Rempak – Karimun (PPI)
11. PP. Bareleng – Batam (PPI)
12. PP. Telaga Punggur – Batam (PPI)
13. PP. Pulau Tiga – Natuna (PPI)
14. PP. Ranai – Natuna (PPI)
15. PP. Sedanau – Natuna (PPI)
16. PP. Penuba – Lingga (PPI)
17. PP. Senayang – Lingga (PPI)
18. PP. Tajur Biru – Lingga (PPI)
19. PP. Tanjungpinang (PPI)

3.4.2. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Analisis/telaah KLHS dilakukan untuk menganalisis pengaruh dan mitigasi dampak indikasi program prioritas renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau 2016-2021. Analisis/telaahan KLHS ini secara rinci disajikan pada Tabel 3.5.

Mitigasi dan rekomendasi terhadap analisis dampak lingkungan terhadap pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Kepulauan Riau dideskripsikan pada rencana aksi pada program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026

TABEL 3.5
RUMUSAN REKOMENDASI KEBIJAKAN STRATEGIS KLHS RPJMD

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	INDIKATOR KINERJA TPB	ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	REKOMENDASI KHLHS
(14) Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan	Persentase kepatuhan pelaku usaha	Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah	Peningkatan kesadaran pelaku usaha perikanan terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah
	Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan.	Cakupan bina kelompok nelayan	Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) bagi pelaku Usaha Pengolahan Ikan (UPI) serta penerbitan SKP dan SIPPHP
	Jumlah nelayan yang terlindungi.	Jumlah nelayan yang mendapat perlindungan asuransi	Optimalisasi pemberian asuransi kepada nelayan

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis yang dilakukan, tantangan pelayanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pembangunan daerah tercermin dari isu strategis yang dihadapi sebagaimana diuraikan berikut ini :

1. Peningkatan produksi dan produktivitas perikanan serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
2. Pengembangan dan penyediaan sarana dan prasarana produksi perikanan dan pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan;
3. Optimalisasi pengembangan usaha yang meliputi pengelolaan usaha, perlindungan dan pengembangan sumberdaya perikanan;
4. Peningkatan daya dukung lingkungan sumberdaya perikanan melalui pengelolaan dan pemanfaatan kawasan kelautan perikanan;

5. Pengembangan kualitas SDM (keterampilan, teknologi, etos kerja) dan kelembagaan pelaku utama perikanan.

Penentuan isu-isu strategis yang mempengaruhi pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau disusun berdasarkan skor kriteria, nilai skala kriteria, dan rata-rata skor kriteria sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini :

TABEL 3.6
SKOR KRITERIA PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

NO	KRITERIA	BOBOT
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra KKP atau Renstra provinsi/kabupaten/kota	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab DKP Provinsi Kepri	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
	Total	100

TABEL 3.7
NILAI SKALA KRITERIA

NO	ISU STRATEGIS	NILAI SKALA KRITERIA KE-					TOTAL SKOR
		1	2	3	4	5	
1	Peningkatan produksi dan produktivitas perikanan serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	4	4	4	3	4	19
2	Pengembangan dan penyediaan sarana dan prasarana produksi perikanan dan pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan	4	3	3	4	3	17
3	Optimalisasi pengembangan usaha yang meliputi pengelolaan usaha, perlindungan dan pengembangan sumberdaya perikanan	3	3	4	3	3	16
4	Peningkatan daya dukung lingkungan sumberdaya perikanan melalui pengelolaan dan pemanfaatan kawasan kelautan perikanan	3	4	4	3	3	17
5	Pengembangan kualitas SDM (keterampilan, teknologi, etos kerja) dan kelembagaan pelaku utama perikanan	4	3	3	4	4	18

Keterangan :

Penentuan Skala Kriteria berdasarkan Likert :

- 0 - 1 : Rendah
- > 1 - 2 : Sedang
- > 2 - 3 : Cukup
- > 3 - 4 : Tinggi

Dengan n = 5, maka didapatkan Isu Strategis sebagaimana terlihat pada table berikut ini :

TABEL 3.8
RATA-RATA SKOR ISU-ISU STRATEGIS

NO.	ISU-ISU STRATEGIS	TOTAL SKOR	RATA-RATA SKOR
1	Peningkatan produksi dan produktivitas perikanan serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	19	3,8
2	Pengembangan dan penyediaan sarana dan prasarana produksi perikanan dan pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan	17	3,4
3	Optimalisasi pengembangan usaha yang meliputi pengelolaan usaha, perlindungan dan pengembangan sumberdaya perikanan	16	3,2
4	Peningkatan daya dukung lingkungan sumberdaya perikanan melalui pengelolaan dan pemanfaatan kawasan kelautan perikanan	17	3,4
5	Pengembangan kualitas SDM (keterampilan, teknologi, etos kerja) dan kelembagaan pelaku utama perikanan	18	3,6

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN



4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Perumusan tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau adalah yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk tahun 2021-2026. Berdasarkan Visi Misi tersebut maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun kedepan.

4.1.1. Tujuan

Sebagaimana tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau yaitu:

“Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya”

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka telah dirumuskan 5 (Lima) Misi dimana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau mendukung dan berkontribusi dalam pelaksanaan misi ke-1 (Pertama) yaitu **Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat**. Oleh karena itu, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau telah merumuskan tujuan yang ingin dicapai berdasarkan tugas pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dan sistem tata kelola yang dengan tujuan untuk mencapai **Optimalisasi Kualitas Perekonomian Sektor Perikanan**. Selanjutnya, untuk mendukung misi ke-2 (Kedua) yaitu **Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan** dengan tujuan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan adalah : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

4.1.2. Sasaran

Dalam mencapai tujuan pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dimaksud diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai. Adapun sasaran untuk mencapai tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap serta meningkatkan kapasitas nelayan terkait teknologi kelautan perikanan;
2. Meningkatkan daya saing dan pemasaran produk hasil perikanan;
3. Mengoptimalkan Pengelolaan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

TABEL 4.1.
SASARAN RENSTRA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPRI TAHUN 2024-2026

TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	2024	2025	2026	KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD
Optimalisasi Kualitas Perekonomian Sektor Perikanan	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB harga berlaku	Miliar Rp	3.313	3.322	3.330	3.330
	Nilai Tukar Nelayan/NTN	Nilai	116	116,1	116,3	116,3
Meningkatkan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap serta meningkatkan kapasitas nelayan terkait teknologi kelautan perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	308.305,60	308.921,60	309.538,60	309.538,60
	Nilai Nelayan/Tukar NTN	Nilai	116,00	116,10	116,30	116,30
	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	30.614,37	32.955,78	35.288,63	35.288,63
	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan/NTPi	Nilai	111,20	111,76	112,32	112,32
Mengoptimalkan Pengelolaan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Kawasan Konservasi yang dikelola minimum sesuai regulasi (sesuai Perdirjen PRL NOMOR 281 KEP-DJPRL I 2020)	Kawasan	4	4	4	4
	Persentase kasus IUU Fishing/konflik pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang diselesaikan	Nilai	90,00	90,00	90,00	90,00
Meningkatkan daya saing dan pemasaran produk hasil perikanan	Jumlah Produk olahan hasil perikanan	Ton	13.200	13.400	13.500	13.500
	Angka Konsumsi Ikan (AKI)	Kg/Kapita	64,98	65,17	65,36	65,62
Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Akuntabilitas Kinerja	Nilai Sakip	BB	BB	BB	BB
Meningkatkan kualitas pengawasan, perencanaan, pengelolaan, dan keuangan pembangunan yang terpadu dan akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip	BB	BB	BB	BB
	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	100	100	100

TABEL 4.2.
TARGET INDIKATOR KINERJA KUNCI (PERMENDAGRI NO. 18 TAHUN 2020)
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024-2026

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	2024	2025	2026	KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) provinsi (sumber data: one data KKP)	Ton	338.920	341.877	344.827	344.827
2	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	%	100	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN



Sinergitas dan Keterkaitan Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau dengan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dari pada misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau pada Misi-1 (pertama) dimana pembangunan berdasar kepada **Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat**, dengan tujuan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat Kepulauan Riau. Oleh karena itu untuk mewujudkan tujuan, diperlukan strategi yang dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif, sesuai dengan fokus bidang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

1. Bidang Perikanan Budidaya
2. Bidang Perikanan Tangkap
3. Bidang Kelautan, Konservasi dan Pengawasan
4. Bidang Pengolahan dan Pemasaran

Fokus pengembangan Kelautan dan Perikanan diatas harus mengedepankan perencanaan yang baik, dukungan anggaran serta penyediaan sumberdaya manusia yang handal dan terlatih agar target dapat tercapai. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau memerlukan suatu strategi dan kebijakan yang tepat. Berikut ini adalah sasaran dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026:

1. Peningkatan produksi Perikanan budidaya dengan Peningkatan industri rumput laut serta optimalisasi perbenihan ikan-ikan laut yang ekonomis;
2. Peningkatan produksi Perikanan tangkap serta peningkatan inovasi dan adopsi teknologi perikanan tangkap untuk nelayan;
3. Meningkatkan produksi olahan hasil kelautan dan perikanan serta akses pasar;
4. Pemanfaatan, pengelolaan serta pengawasan kawasan strategis sektor perikanan (sampai dengan 12 mil)

Berdasarkan sasaran di atas, dikaitkan dengan target-target solusi yang dirumuskan dalam tujuan dan sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan selama 5 (lima) tahun 2021-2026.

Adapun strategi dan arah kebijakan dapat dijabarkan sebagai berikut :

TABEL 5.1.

TUJAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

VISI : TERWUJUDNYA KEPULAUAN RIAU YANG MAKMUR, BERDAYA SAING, DAN BERBUDAYA

MISI KE 1 : PERCEPATAN PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI BERBASIS MARITIM, BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN KEUNGGULAN WILAYAH UNTUK PENINGKATAN KEMAKMURAN MASYARAKAT

TUJUAN	NO	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Optimalisasi Kualitas Perekonomian Sektor Perikanan	1	Meningkatkan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap serta meningkatkan kapasitas nelayan terkait teknologi kelautan perikanan	Peningkatan produksi Perikanan budidaya dengan Peningkatan industri rumput laut serta optimalisasi perbenihan ikan-ikan laut yang ekonomis	● Pengembangan usaha budidaya perikanan pada komoditas unggulan daerah
				● Peningkatan Sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya;
				● Pengendalian dan kesehatan lingkungan perikanan budidaya
				● Pengembangan kluster kawasan budidaya perikanan
			Peningkatan produksi Perikanan tangkap serta peningkatan inovasi dan adopsi teknologi perikanan tangkap untuk nelayan	● Pelatihan kompetensi pembudidaya perikanan
				● Penataan pemanfaatan/data dan informasi Sumber Daya Ikan
				● Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
				● Penerbitan rekomendasi dokumen perizinan di bidang perikanan tangkap secara tepat waktu
				● Pengembangan sarana prasarana pelabuhan perikanan
	2.	Meningkatkan daya saing dan pemasaran produk hasil perikanan	Meningkatkan produksi olahan hasil kelautan dan perikanan serta akses pasar	● Pembinaan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
				● Peningkatan nilai tambah dan promosi hasil kelautan dan perikanan;
				● Pelatihan keterampilan pengolah dan pemasaran hasil perikanan;
	3	Mengoptimalkan Pengelolaan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Pemanfaatan, pengelolaan serta pengawasan kawasan strategis sektor perikanan (sampai dengan 12 mil)	● Pembinaan dan pengawasan mutu hasil perikanan, pengembangan sistem jaminan mutu dan pengujian mutu hasil perikanan
				● Penyusunan dokumen pengelolaan dan pemanfaatan kawasan strategis
				● Penerbitan dokumen izin/rekomendasi dan pemanfaatan kawasan strategis

TUJUAN	NO	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
				<ul style="list-style-type: none"> ● Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia pesisir ● Peningkatan pengawasan pemanfaatan Sumber daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 mil ● Perlindungan ekosistem dan jenis sumber daya kelautan dan perikanan ● Penataan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan
Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	4	Meningkatkan kualitas pengawasan, perencanaan, pengelolaan, dan keuangan pembangunan yang terpadu dan akuntabel	Meningkatkan nilai Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Meningkatkan kualitas kinerja dalam kelancaran pelayanan Administrasi perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> ● Penerapan anggaran berbasis kinerja ● Meningkatkan pembinaan SAKIP ● Penguatan kualitas peran APIP dalam pelaksanaan pengawasan ● Penyusunan pelaporan keuangan Perangkat Daerah ● Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah ● Penyusunan perencanaan penganggaran Perangkat Daerah ● Mengamankan sarana prasana Perangkat Daerah ● Penyediaan alat tulis dan barang cetakan Perangkat Daerah ● Penyediaan peralatan penunjang pelayanan administrasi perkantoran ● Melaksanakan pemeliharaan dan rehabilitasi dalam upaya peningkatan sarana dan prasarana Perangkat daerah



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN



Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif merupakan bagian dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif ini disajikan pada Tabel 6.1. Program-program yang direncanakan untuk dilaksanakan selama tahun 2021-2026 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tujuan Program ini adalah untuk merencanakan kegiatan pembangunan secara terpadu, meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pembangunan serta memenuhi kebutuhan sarana prasarana aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri, dengan sasaran meningkatnya pelayanan yang prima, meningkatnya kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau. Adapun kegiatan dan sub kegiatan program ini adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
8. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

II. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Tujuan program adalah Peningkatan jumlah produksi perikanan tangkap, Nilai Tukar Nelayan (NTN) Perizinan Usaha yang diterbitkan, Persentase kapal perikanan bermotor, Jumlah pelabuhan perikanan yang beroperasi dan memenuhi persyaratan pelabuhan perikanan dan Retribusi Pelayanan Pelabuhan Perikanan Pantai (P3) Antang. Adapun kegiatan dan sub kegiatan program ini adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil
 - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
 - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
2. Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT
 - Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT
 - Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT
 - Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT
3. Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil
 - Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil
4. Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT
5. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi
 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan
 - Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan
 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan (BP3 Antang)

6. Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT
 - Penetapan Persyaratan dan Prosedur Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT
 - Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT
7. Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT
 - Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT
8. Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT
 - Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT
 - Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT
9. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
 - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
10. Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT
 - Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT

III. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Tujuan program adalah meningkatkan dan mengembangkan sektor perikanan budidaya, dengan sasaran peningkatan produksi perikanan budidaya, Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi), Jumlah Balai Benih Ikan (BBI). Adapun kegiatan dan sub kegiatan program ini adalah sebagai berikut :

1. Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
 - Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
 - Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan
2. Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut sampai dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing
 - Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
 - Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan

3. Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing
 - Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT
 - Penerbitan Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT
4. Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
5. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut
 - Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut
 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut
 - Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi
 - Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut (UPTD Balai Benih Ikan)
 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut (UPTD Balai Benih Ikan)

IV. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Tujuan program adalah meningkatkan dan mengembangkan sektor pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan, dengan sasaran mendukung peningkatan produksi hasil kelautan dan perikanan, Jumlah Kelompok Pengolah dan Pemasar hasil perikanan yang mendapatkan Surat Kelayakan Pengolahan (SKP)). Adapun kegiatan dan sub kegiatan program ini adalah sebagai berikut :

1. Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

- Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
 - Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
 - Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing
 3. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

V. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Tujuan program adalah mewujudkan penataan dan pemanfaatan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, serta meningkatnya ketaatan dan ketertiban dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, dengan sasaran Dokumen perencanaan pengelolaan Pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, Peningkatan status kawasan konservasi perairan yang dikelola meningkat dari Level II menjadi Level III, dan Penambahan jenis ekosistem yang dilindungi di daerah konservasi. Adapun kegiatan dan sub kegiatan program ini adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
 - Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat
 - Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil
2. Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
 - Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
 - Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
 - Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional
 - Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir

- Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut
3. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

VI. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Tujuan program adalah mewujudkan penataan dan pemanfaatan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, serta meningkatnya ketaatan dan ketertiban dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, bebas Illegal, Unreported & Unregulated (IUU) fishing. Adapun kegiatan dan sub kegiatan program ini adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil
 - Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil
 - Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil
 - Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil
 - Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)
2. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya
 - Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya
 - Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Tabel 6.1.
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode					Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
										2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3					4	5	6	10 a	10 b	11 a	11 b	12 a	12 b	13 a	13 b	14
		3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
		3	25				KELAUTAN DAN PERIKANAN											
		3	25	01			DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				73.296.413.023		100.795.495.721		103.836.130.126		277.928.038.870	
Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan kualitas pengawasan, perencanaan, pengelolaan, dan keuangan pembangunan yang terpadu dan akuntabel	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	BB	39.092.777.046	BB	42.135.144.422	BB	42.923.776.762	BB	124.151.698.230	
								Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri	Persen	100		100		100		100		
		3	25	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	226.646.849	100	529.000.000	100	527.063.000	100	1.282.709.849	
		3	25	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	143.860.896	3	250.000.000	2	248.063.000	7	641.923.896	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
			25	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Laporan	2	54.570.459	0	-	0	-	2	54.570.459	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
		3	25	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	0	0	2	99.000.000	2	99.000.000	4	198.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
		3	25	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	28.215.494	4	180.000.000	4	180.000.000	12	388.215.494	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
		3	25	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase ketersediaan dokumen penatausahaan keuangan perangkat daerah	Persen	100	25.171.776.718	100	23.656.709.913	100	24.104.861.753	100	72.933.348.384	
		3	25	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	96	23.870.217.818	98	22.136.709.913	98	22.582.861.753	98	68.589.789.484	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
		3	25	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	12	1.283.472.000	12	1.500.000.000	12	1.500.000.000	12	4.283.472.000	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
		3	25	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaa Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	0	-	1	10.000.000	1	11.000.000	2	21.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
		3	25	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	18.086.900	1	10.000.000	1	11.000.000	5	39.086.900	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
		3	25	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase ketersediaan dokumen Penatausahaan BMD Perangkat Daerah	Persen	0	-	100	110.000.000	100	112.000.000	100	222.000.000	
		3	25	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	-	1	25.000.000	1	25.000.000	2	50.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
										0	-	1	25.000.000	1	25.000.000	2	50.000.000	Cabang Dinas KP Lingga
										0	-	1	10.000.000	1	12.000.000	2	22.000.000	UPTD BBI
								0	-	1	25.000.000	1	25.000.000	2	50.000.000	UPTD BPP Antang		
		3	25	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	-	1	15.000.000	1	15.000.000	2	30.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
		3	25	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	-	1	10.000.000	1	10.000.000	2	20.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri

Tujuan	Sasaran	Kode				Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	
									2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		3	25	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	Persen	100	236.730.886,00	100	658.552.983	100	541.288.718	100	1.436.572.587		
		3	25	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	-	1	158.552.983	1	100.000.000	2	258.552.983	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
		3	25	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	2	100.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
		3	25	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	35	236.730.886	20	300.000.000	20	300.000.000	75	836.730.886	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
		3	25	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Orang	0	-	31	150.000.000	31	91.288.718	62	241.288.718	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
		3	25	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	Persen	100	2.369.567.663,00	100	2.586.563.291	100	3.075.617.266	100	8.031.748.220	-	
		3	25	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	5	23.315.200	10	50.000.000	10	50.000.000	25	123.315.200	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
										0	-	4	15.000.000	4	15.000.000	8	30.000.000	Cabang Dinas KP Anambas
										0	-	4	15.000.000	4	15.000.000	8	30.000.000	Cabang Dinas KP Natuna
										0	-	4	15.000.000	4	15.000.000	8	30.000.000	Cabang Dinas KP Lingga
										0	-	4	15.000.000	4	15.000.000	8	30.000.000	Cabang Dinas KP Karimun
										0	-	4	15.000.000	4	15.000.000	8	30.000.000	Cabang Dinas KP Batam
										0	-	4	20.000.000	4	25.000.000	8	45.000.000	UPTD BBI
										0	-	4	15.000.000	4	15.000.000	8	30.000.000	UPTD BPMP2KP
										2	7.893.216	4	15.000.000	4	15.000.000	10	37.893.216	UPTD BPP Antang
		3	25	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	10	124.607.281	10	40.000.000	10	40.000.000	30	204.607.281	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
										1	10.911.400	2	20.000.000	2	20.000.000	5	50.911.400	Cabang Dinas KP Anambas
										0	-	2	20.000.000	2	20.000.000	4	40.000.000	Cabang Dinas KP Natuna
										0	-	2	20.000.000	2	20.000.000	4	40.000.000	Cabang Dinas KP Lingga
										0	-	2	20.000.000	2	20.000.000	4	40.000.000	Cabang Dinas KP Karimun
										0	-	2	20.000.000	2	20.000.000	4	40.000.000	Cabang Dinas KP Batam
										0	-	2	10.000.000	2	10.000.000	4	20.000.000	UPTD BBI
										0	-	2	10.000.000	2	20.000.000	4	30.000.000	UPTD BPMP2KP
										0	-	2	10.000.000	2	20.000.000	4	30.000.000	UPTD BPP Antang
		3	25	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	7	142.300.341	10	60.000.000	10	80.000.000	27	282.300.341	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
										1	2.800.000	2	20.000.000	2	20.000.000	5	42.800.000	Cabang Dinas KP Anambas
										6	500.725.782	2	20.000.000	2	20.000.000	10	540.725.782	Cabang Dinas KP Natuna

Tujuan	Sasaran	Kode	Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab				
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
								0	-	2	20.000.000	2	20.000.000	4	40.000.000	Cabang Dinas KP Lingga		
								5	19.331.600	2	20.000.000	2	20.000.000	9	59.331.600	Cabang Dinas KP Karimun		
								3	38.007.500	2	20.000.000	2	20.000.000	7	78.007.500	Cabang Dinas KP Batam		
								1	3.156.000	2	10.000.000	2	20.000.000	5	33.156.000	UPTD BBI		
								0	-	2	10.000.000	2	20.000.000	4	30.000.000	UPTD BPMP2KP		
								3	56.750.354	2	10.000.000	2	20.000.000	7	86.750.354	UPTD BPP Antang		
		3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	4	66.310.700	2	20.000.000	3	20.000.000	9	106.310.700	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
								1	11.255.743	1	6.000.000	1	10.000.000	3	27.255.743	Cabang Dinas KP Anambas		
								0	-	1	6.000.000	1	10.000.000	2	16.000.000	Cabang Dinas KP Natuna		
								0	-	1	6.000.000	1	10.000.000	2	16.000.000	Cabang Dinas KP Lingga		
								0	-	1	6.000.000	1	10.000.000	2	16.000.000	Cabang Dinas KP Karimun		
								0	-	1	6.000.000	1	10.000.000	2	16.000.000	Cabang Dinas KP Batam		
								0	-	1	6.000.000	1	10.000.000	2	16.000.000	UPTD BBI		
								0	-	1	6.000.000	1	10.000.000	2	16.000.000	UPTD BPMP2KP		
								0	-	1	6.000.000	1	10.000.000	2	16.000.000	UPTD BPP Antang		
		3	25	1	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	-	1	150.000.000	1	200.000.000	2	350.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
		3	25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	63.087.000	12	25.000.000	12	40.000.000	28	128.087.000	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
										0	-	12	10.000.000	12	20.000.000	24	30.000.000	Cabang Dinas KP Anambas
										0	-	12	10.000.000	12	20.000.000	24	30.000.000	Cabang Dinas KP Natuna
										0	-	12	10.000.000	12	20.000.000	24	30.000.000	Cabang Dinas KP Lingga
										0	-	12	10.000.000	12	20.000.000	24	30.000.000	Cabang Dinas KP Karimun
										0	-	12	10.000.000	12	20.000.000	24	30.000.000	Cabang Dinas KP Batam
										0	-	12	10.000.000	12	20.000.000	24	30.000.000	UPTD BBI
										0	-	12	10.000.000	12	20.000.000	24	30.000.000	UPTD BPMP2KP
										0	-	12	10.000.000	12	20.000.000	24	30.000.000	UPTD BPP Antang
		3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1.051.382.466	12	548.563.291	12	785.617.266	25	2.385.563.023	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
										4	24.883.600	12	100.000.000	12	100.000.000	28	224.883.600	Cabang Dinas KP Anambas
										4	180.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	28	480.000.000	Cabang Dinas KP Natuna
										0	-	12	150.000.000	12	150.000.000	24	300.000.000	Cabang Dinas KP Lingga
										0	-	12	150.000.000	12	150.000.000	24	300.000.000	Cabang Dinas KP Karimun
										0	-	12	150.000.000	12	150.000.000	24	300.000.000	Cabang Dinas KP Batam
										0	-	12	100.000.000	12	100.000.000	24	200.000.000	UPTD BBI
										0	-	12	100.000.000	12	100.000.000	24	200.000.000	UPTD BPMP2KP
										4	42.849.480	12	150.000.000	12	150.000.000	28	342.849.480	UPTD BPP Antang

Tujuan	Sasaran	Kode					Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
										2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		3	25	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	2	100.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
										0	-	1	10.000.000	1	10.000.000	2	20.000.000	Cabang Dinas KP Anambas
										0	-	1	10.000.000	1	10.000.000	2	20.000.000	Cabang Dinas KP Natuna
										0	-	1	10.000.000	1	10.000.000	2	20.000.000	Cabang Dinas KP Lingga
										0	-	1	10.000.000	1	10.000.000	2	20.000.000	Cabang Dinas KP Karimun
										0	-	1	10.000.000	1	10.000.000	2	20.000.000	Cabang Dinas KP Batam
										0	-	1	10.000.000	1	10.000.000	2	20.000.000	UPTD BBI
										0	-	1	10.000.000	1	10.000.000	2	20.000.000	UPTD BPMP2KP
										0	-	1	10.000.000	1	10.000.000	2	20.000.000	UPTD BPP Antang
		3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	Persen	100	385.670.900,00	100	4.368.000.000	100	4.600.000.000	100	9.353.670.900	
		3	25	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Unit	0	-	1	115.000.000	1	115.000.000	2	230.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
										0	-	1	23.000.000	1	25.000.000	2	48.000.000	UPTD BBI
		3	25	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit	4	171.832.480	1	200.000.000	3	500.000.000	8	871.832.480	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
										0	-	2	180.000.000	0	-	2	180.000.000	Cabang Dinas KP Anambas
										0	-	2	180.000.000	2	250.000.000	4	430.000.000	Cabang Dinas KP Natuna
										0	-	2	180.000.000	2	250.000.000	4	430.000.000	Cabang Dinas KP Lingga
										0	-	2	180.000.000	2	250.000.000	4	430.000.000	Cabang Dinas KP Karimun
										0	-	2	180.000.000	2	250.000.000	4	430.000.000	Cabang Dinas KP Batam
										0	-	2	180.000.000	2	250.000.000	4	430.000.000	UPTD BBI
										0	-	2	180.000.000	0	-	2	180.000.000	UPTD BPMP2KP
										0	-	2	180.000.000	0	-	2	180.000.000	UPTD BPP Antang
		3	25	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Paket	0	-	3	400.000.000	2	400.000.000	5	800.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
										0	-	2	50.000.000	2	50.000.000	4	100.000.000	Cabang Dinas KP Anambas
										0	-	2	50.000.000	2	50.000.000	4	100.000.000	Cabang Dinas KP Natuna
										0	-	2	50.000.000	2	50.000.000	4	100.000.000	Cabang Dinas KP Lingga
										0	-	2	50.000.000	2	50.000.000	4	100.000.000	Cabang Dinas KP Karimun
										0	-	2	50.000.000	2	50.000.000	4	100.000.000	Cabang Dinas KP Batam
										0	-	2	50.000.000	2	50.000.000	4	100.000.000	UPTD BBI
										0	-	2	50.000.000	2	50.000.000	4	100.000.000	UPTD BPMP2KP
										0	-	2	50.000.000	2	50.000.000	4	100.000.000	UPTD BPP Antang

Tujuan	Sasaran	Kode					Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	
										2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		3	25	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	20	183.719.490	50	850.000.000	30	550.000.000	100	1.583.719.490	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri	
										1	12.537.000	1	20.000.000	1	20.000.000	3	52.537.000	Cabang Dinas KP Anambas	
											0	-	1	20.000.000	1	20.000.000	2	40.000.000	Cabang Dinas KP Natuna
											0	-	1	20.000.000	1	20.000.000	2	40.000.000	Cabang Dinas KP Lingga
											0	-	1	20.000.000	1	20.000.000	2	40.000.000	Cabang Dinas KP Karimun
											0	-	1	20.000.000	1	20.000.000	2	40.000.000	Cabang Dinas KP Batam
											0	-	1	20.000.000	1	20.000.000	2	40.000.000	UPTD BBI
											0	-	1	20.000.000	1	20.000.000	2	40.000.000	UPTD BPMP2KP
											3	17.581.930	1	20.000.000	1	20.000.000	5	57.581.930	UPTD BPP Antang
		3	25	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	-	1	50.000.000	2	200.000.000	3	250.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri	
		3	25	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	-	1	50.000.000	1	100.000.000	2	150.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri	
											0	-	1	30.000.000	1	50.000.000	2	80.000.000	Cabang Dinas KP Anambas
											0	-	1	30.000.000	1	50.000.000	2	80.000.000	Cabang Dinas KP Natuna
											0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	2	100.000.000	Cabang Dinas KP Lingga
											0	-	1	30.000.000	1	50.000.000	2	80.000.000	Cabang Dinas KP Karimun
											0	-	1	30.000.000	1	50.000.000	2	80.000.000	Cabang Dinas KP Batam
											0	-	1	30.000.000	1	50.000.000	2	80.000.000	UPTD BBI
											0	-	1	30.000.000	1	50.000.000	2	80.000.000	UPTD BPMP2KP
											0	-	1	30.000.000	1	50.000.000	2	80.000.000	UPTD BPP Antang
		3	25	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	-	3	100.000.000	3	100.000.000	6	200.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri	
		3									0	-	2	40.000.000	2	50.000.000	4	90.000.000	Cabang Dinas KP Anambas
		3									0	-	2	40.000.000	2	50.000.000	4	90.000.000	Cabang Dinas KP Natuna
		3									0	-	2	40.000.000	2	50.000.000	4	90.000.000	Cabang Dinas KP Lingga
		3									0	-	2	40.000.000	2	50.000.000	4	90.000.000	Cabang Dinas KP Karimun
		3									0	-	2	40.000.000	2	50.000.000	4	90.000.000	Cabang Dinas KP Batam
		3									0	-	2	40.000.000	2	50.000.000	4	90.000.000	UPTD BBI

Tujuan	Sasaran	Kode					Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
										2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		3								0	-	2	40.000.000	2	50.000.000	4	90.000.000	UPTD BPMP2KP
		3								0	-	2	40.000.000	2	50.000.000	4	90.000.000	UPTD BPP Antang
		3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan penunjang perangkat daerah yang tersedia	Persen	100	8.307.862.926	100	8.466.318.235	100	8.492.946.025	100	25.267.127.186	
		3	25	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	0	-	1	20.000.000	1	20.000.000	2	40.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
										0	-	1	4.000.000	1	10.000.000	2	14.000.000	Cabang Dinas KP Anambas
										0	-	1	4.000.000	1	10.000.000	2	14.000.000	Cabang Dinas KP Natuna
										0	-	1	4.000.000	1	10.000.000	2	14.000.000	Cabang Dinas KP Lingga
										0	-	1	4.000.000	1	10.000.000	2	14.000.000	Cabang Dinas KP Karimun
										0	-	1	4.000.000	1	10.000.000	2	14.000.000	Cabang Dinas KP Batam
										0	-	1	4.000.000	1	10.000.000	2	14.000.000	UPTD BBI
										0	-	1	4.000.000	1	10.000.000	2	14.000.000	UPTD BPMP2KP
										0	-	1	4.000.000	1	10.000.000	2	14.000.000	UPTD BPP Antang
		3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	755.401.405	12	43.885.090	12	45.000.000	36	844.286.495	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
										12	15.299.280	12	17.594.172	12	20.000.000	36	52.893.452	Cabang Dinas KP Anambas
										12	26.521.224	12	30.499.408	12	30.499.408	36	87.520.040	Cabang Dinas KP Natuna
										12	34.689.520	12	39.892.948	12	40.000.000	36	114.582.468	Cabang Dinas KP Lingga
										12	73.884.415	12	84.967.077	12	84.967.077	36	243.818.569	Cabang Dinas KP Karimun
										12	82.992.500	12	95.441.375	12	95.441.375	36	273.875.250	Cabang Dinas KP Batam
										12	256.800.000	12	295.320.000	12	295.320.000	36	847.440.000	UPTD BBI
										12	109.882.560	12	126.364.944	12	126.364.944	36	362.612.448	UPTD BPMP2KP
		3								12	426.394.105	12	490.353.221	12	490.353.221	36	1.407.100.547	UPTD BPP Antang
		3	25	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	0	-	12	840.000.000	12	840.000.000	24	1.680.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
		3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12	2.004.869.174	12	1.500.000.000	12	1.500.000.000	36	5.004.869.174	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
										12	199.422.288	12	350.000.000	12	325.000.000	36	874.422.288	Cabang Dinas KP Anambas
										12	604.720.480	12	600.000.000	12	600.000.000	36	1.804.720.480	Cabang Dinas KP Natuna
										12	491.731.816	12	400.000.000	12	400.000.000	36	1.291.731.816	Cabang Dinas KP Lingga
										12	735.092.462	12	800.000.000	12	800.000.000	36	2.335.092.462	Cabang Dinas KP Karimun

Tujuan	Sasaran	Kode					Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
										2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
										12	456.300.000	12	700.000.000	12	700.000.000	36	1.856.300.000	Cabang Dinas KP Batam
										12	1.039.324.968	12	900.000.000	12	900.000.000	36	2.839.324.968	UPTD BBI
										12	513.608.019	12	600.000.000	12	600.000.000	36	1.713.608.019	UPTD BPMP2KP
										12	480.928.710	12	500.000.000	12	500.000.000	36	1.480.928.710	UPTD BPP Antang
		3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentasi Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin, Gedung dan Bangunan	Persen	100	2.394.521.104	100	1.760.000.000	100	1.470.000.000	100	5.624.521.104	
		3	25	01	1.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	4	152.583.824,00	5	100.000.000	5	50.000.000	14	302.583.824	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
										0	-	1	20.000.000	1	10.000.000	2	30.000.000	Cabang Dinas KP Anambas
										0	-	1	20.000.000	1	10.000.000	2	30.000.000	Cabang Dinas KP Natuna
										0	-	1	20.000.000	1	20.000.000	2	40.000.000	Cabang Dinas KP Lingga
										1	6.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	3	46.000.000	Cabang Dinas KP Karimun
										0	-	1	20.000.000	1	20.000.000	2	40.000.000	Cabang Dinas KP Batam
										3	49.965.000	1	20.000.000	1	20.000.000	5	89.965.000	UPTD BBI
										0	-	1	20.000.000	1	20.000.000	2	40.000.000	UPTD BPMP2KP
										0	-	1	20.000.000	1	20.000.000	2	40.000.000	UPTD BPP Antang
		3	25	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	46	305.363.031	20	100.000.000	10	50.000.000	76	455.363.031	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
										2	55.306.577	2	15.000.000	3	10.000.000	7	80.306.577	Cabang Dinas KP Anambas
										0	-	3	15.000.000	2	10.000.000	5	25.000.000	Cabang Dinas KP Natuna
										2	286.963.126	3	15.000.000	3	10.000.000	8	311.963.126	Cabang Dinas KP Lingga

Tujuan	Sasaran	Kode					Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
										2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
										0	-	3	50.000.000	3	50.000.000	6	100.000.000	Cabang Dinas KP Batam
										0	-	2	15.000.000	2	10.000.000	4	25.000.000	UPTD BPMP2KP
		3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	50	44.250.000	6	30.000.000	6	30.000.000	62	104.250.000	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
										0	-	2	10.000.000	2	10.000.000	4	20.000.000	Cabang Dinas KP Anambas
										9	21.814.386	2	10.000.000	2	10.000.000	13	41.814.386	Cabang Dinas KP Natuna
										0	-	2	10.000.000	2	10.000.000	4	20.000.000	Cabang Dinas KP Lingga
										0	-	2	10.000.000	2	10.000.000	4	20.000.000	Cabang Dinas KP Karimun
										0	-	2	10.000.000	2	10.000.000	4	20.000.000	Cabang Dinas KP Batam
										0	-	2	10.000.000	2	10.000.000	4	20.000.000	UPTD BBI
										4	2.500.000	2	10.000.000	2	10.000.000	8	22.500.000	UPTD BPMP2KP
										7	1.383.555.000	2	10.000.000	2	10.000.000	11	1.403.555.000	UPTD BPP Antang
		3	25	01	1.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	0	-	5	50.000.000	5	50.000.000	10	100.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
		3	25	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Unit	1	55.366.800	2	50.000.000	2	50.000.000	5	155.366.800	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
										0	-	1	20.000.000	1	20.000.000	2	40.000.000	Cabang Dinas KP Batam
										0	-	3	100.000.000	3	50.000.000	6	150.000.000	UPTD BBI
										0	-	3	100.000.000	3	50.000.000	6	150.000.000	UPTD BPMP2KP
										0	-	2	50.000.000	2	50.000.000	4	100.000.000	UPTD BPP Antang
		3	25	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	-	2	300.000.000	2	250.000.000	4	550.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
										0	-	1	20.000.000	1	20.000.000	2	40.000.000	Cabang Dinas KP Anambas
										0	-	1	20.000.000	1	20.000.000	2	40.000.000	Cabang Dinas KP Natuna
										0	-	1	20.000.000	1	20.000.000	2	40.000.000	Cabang Dinas KP Lingga
										0	-	1	20.000.000	1	20.000.000	2	40.000.000	Cabang Dinas KP Karimun
										0	-	2	20.000.000	2	20.000.000	4	40.000.000	Cabang Dinas KP Batam
										0	-	2	50.000.000	2	50.000.000	4	100.000.000	UPTD BBI
										0	-	1	20.000.000	1	20.000.000	2	40.000.000	UPTD BPMP2KP
										0	-	1	20.000.000	1	20.000.000	2	40.000.000	UPTD BPP Antang
		3	25	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	0	-	2	250.000.000	2	250.000.000	4	500.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri

Tujuan	Sasaran	Kode					Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
										2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Optimalisasi Kualitas Perekonomian Sektor Perikanan										0	-	1	10.000.000	1	10.000.000	2	20.000.000	Cabang Dinas KP Anambas
										0	-	1	10.000.000	1	10.000.000	2	20.000.000	Cabang Dinas KP Natuna
										1	30.853.360	1	10.000.000	1	10.000.000	3	50.853.360	Cabang Dinas KP Lingga
										0	-	1	10.000.000	1	10.000.000	2	20.000.000	Cabang Dinas KP Karimun
										0	-	1	10.000.000	1	10.000.000	2	20.000.000	UPTD BBI
										0	-	1	10.000.000	1	10.000.000	2	20.000.000	UPTD BPMP2KP
										0	-	1	10.000.000	1	10.000.000	2	20.000.000	UPTD BPP Antang
	Mengoptimalkan Pengelolaan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Kawasan Konservasi yang Dikelola Minimum (sesuai Perdirjen PRL NOMOR 281 KEP-DJPRL I 2020)	Kawasan	4	403.976.012	4	6.647.507.205	4	5.325.601.363	4	12.377.084.580	
		3	25	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah dokumen peraturan pengelolaan pemanfaatan ruang laut	Dokumen	1	176.227.848	1	2.422.507.205	1	2.318.032.376	4	4.916.767.429	
								Luas kawasan konservasi daerah yang dikelola minimum	Ha	138.561,42		575.514,88		1.899.213,88		3.824.653,13		
		3	25	02	1.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah dokumen materi teknis muatan perairan pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K	dokumen	0	-					0	-	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
		3	25	02	1.01	02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luas Kawasan Konservasi di Wilayah Peisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang terkelola	Ha	138.561,42	176.227.848	575.514,88	1.072.507.205	1.899.213,88	800.000.000	2.613.290,18	2.048.735.053	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
										0	-	0	-	297.414,51	50.000.000	297.414,51	50.000.000	Cabang Dinas KP Natuna
										0	-	371.085,02	50.000.000	371.085,02	50.000.000	742.170,04	100.000.000	Cabang Dinas KP Lingga
										0	-	65.868,44	50.000.000	65.868,44	50.000.000	131.736,88	100.000.000	Cabang Dinas KP Batam
		3	25	02	1.01	03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang di Rehabilitasi	Ha	0	-	10	500.000.000	12	500.000.000	22	1.000.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
		3	25	02	1.01	04	Mitigasi Bencana Wlayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh informasi terkait mitigasi bencana melalui Program Mitigasi bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Orang	0	-	210	250.000.000	210	250.000.000	420	500.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
		3	25	02	1.01	05	Penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil /Dokumen Final RZWP-3-K/	Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K	dokumen			1	500.000.000	1	618.032.376	2	1.118.032.376	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
		3	25	02	1.02		Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi izin pemanfaatan ruang laut	Rekomendasi	0	122.667.144,00	100	1.200.000.000,00	50	475.000.000,00	250	1.797.667.144,00	
		3	25	02	1.02	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Rekomendasi	-	0	-	0	-	0	0	-	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri

Tujuan	Sasaran	Kode	Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab				
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
		3	25	03	1.03	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan	Rekomendasi	50	122.667.144	-	0	-	0	50	122.667.144	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
		3	25	04	1.04	03	Pelaksanaan Fasilitas Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang Diterbitkan	Rekomendasi	-	0	-	0	-	0	0	-	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
		3	25	02	1.02	04	Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang Diterbitkan	Rekomendasi	0	-	-	0	-	0	0	-	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
		3	25	02	1.02	05	Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	Jumlah Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	Dokumen			-	0	-	0	0	-	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
		3	25	02	1.02	06	Pencatatan dan Pengadministrasian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber daya Pesisir dan Laut sebagai database perizinan berusaha	Jumlah database perizinan Berusaha yang dicatat atau didokumentasikan	Dokumen			100	100.000.000	50	100.000.000	150	200.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
		3	25	02	1.02	07	Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	Dokumen			100	1.100.000.000	50	375.000.000	150	1.475.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
		3	25	02	1.03		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau Pulau Kecil	Jumlah masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang terampil	Orang	20	105.081.020	450	3.025.000.000	350	2.532.568.987	1114	5.662.650.007	
		3	25	02	1.03	01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	0	-	200	2.500.000.000	100	1.857.568.987	300	4.357.568.987	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
										0	-	50	50.000.000	50	50.000.000	100	100.000.000	Cabang Dinas KP Anambas
										0	-	50	50.000.000	50	50.000.000	100	100.000.000	Cabang Dinas KP Natuna
										20	105.081.020	50	50.000.000	50	50.000.000	120	205.081.020	Cabang Dinas KP Lingga
										0	-	50	50.000.000	50	50.000.000	100	100.000.000	Cabang Dinas KP Karimun
										0	-	50	50.000.000	50	50.000.000	100	100.000.000	Cabang Dinas KP Batam
		3	25	02	1.03	02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kelompok	0	-	7	175.000.000	7	175.000.000	14	350.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
										0	-	5	20.000.000	5	50.000.000	10	70.000.000	Cabang Dinas KP Anambas
										0	-	5	20.000.000	5	50.000.000	10	70.000.000	Cabang Dinas KP Natuna
										0	-	5	20.000.000	5	50.000.000	10	70.000.000	Cabang Dinas KP Lingga
										0	-	5	20.000.000	5	50.000.000	10	70.000.000	Cabang Dinas KP Karimun
										0	-	5	20.000.000	5	50.000.000	10	70.000.000	Cabang Dinas KP Batam
		3	25	02	1.03	03	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Orang	0	-	0	-	0	-	0	-	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
Meningkatkan produksi perikanan budidaya dan		3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	308.305,60	24.439.063.436	308.921,60	25.796.372.755	309.538,60	26.296.372.756	309.538,60	76.531.808.947	
							Nilai Tukar Nelayan (NTN)		%	116		116,1		116,3		116,3		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	
										2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	perikanan tangkap serta meningkatkan kapasitas nelayan terkait teknologi kelautan perikanan	3	25	03	1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap yang diserahkan	Unit	26740	14.074.348.491	1800	22.093.860.138	1500	22.311.372.756	1500	58.479.581.385		
								Jumlah Nelayan Yang Mendapatkan Pembinaan Usaha Kenelayanan (Asuransi nelayan, KUB/Pelaku usaha)	Orang	36.228		36.228		36.228		36.228			
								Jumlah penerima bantuan sarana perikanan tangkap	Orang/Kelompok	2208		1500		1000		1000			
		3	25	03	1.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumberdaya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Dokumen	0	-	1	200.000.000	1	200.000.000	1	400.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri	
		3	25	03	1.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Yang Tersedia Di Wilayah laut Sampai Dengan 12 Mil	Unit	1	6.990.019.900	1	8.196.943.683	1	8.500.000.000	1	23.686.963.583	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri	
		3	25	03	1.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap Yang Tersedia Di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	(Unit/Paket)	15.846	7.084.328.591	-	-	-	-	16.437	7.084.328.591	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri	
		3	25	03	1.01	010	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				16.437	13.696.916.455	16.437	13.611.372.756	16.437	27.308.289.211	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri	
		3	25	03	1.03		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT yang diterbitkan	Rekomendasi	150	62.755.301,00	0	150.000.000,00	0	150.000.000,00	350	362.755.301,00		
		3	25	03	1.03	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan	Rekomendasi	150	62.755.301					350	62.755.301	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri	
		3	25	03	1.03	04	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Persentase			90	150.000.000	90	150.000.000	90	300.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri	
		3	25	03	1.04		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil yang diterbitkan	Rekomendasi	0	-	0	-	0	-	0	-		
		3	25	03	1.04	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan	Rekomendasi	0	-	0	-	0	-	0	-	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri	
											0	-	0	-	0	-	0	-	Cabang Dinas KP Anambas
											0	-	0	-	0	-	0	-	Cabang Dinas KP Natuna
											0	-	0	-	0	-	0	-	Cabang Dinas KP Lingga
											0	-	0	-	0	-	0	-	Cabang Dinas KP Karimun
											0	-	0	-	0	-	0	-	Cabang Dinas KP Batam

Tujuan	Sasaran	Kode				Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	
									2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		3	25	03	1.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang diterbitkan	Dokumen	20	31.892.970	1410	802.512.617	1410	800.000.000	20	1.634.405.587		
		3	25	03	1.05	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen	0	-	0	-	0	-	0	-	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
		3	25	03	1.05	02	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	Dokumen	0	-	0	-	0	-	0	-	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
										0	-	0	-	0	-	0	-	Cabang Dinas KP Anambas
										0	-	0	-	0	-	0	-	Cabang Dinas KP Natuna
										20	31.892.970	0	-	0	-	20	31.892.970	Cabang Dinas KP Lingga
										0	-	0	-	0	-	0	-	Cabang Dinas KP Karimun
										0	-	0	-	0	-	0	-	Cabang Dinas KP Batam
		3	25	03	1.05	03	Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan	Dokumen	0	-	250	400.000.000	250	400.000.000	250	800.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
										0	-	40	40.000.000	40	40.000.000	40	80.000.000	Cabang Dinas KP Anambas
										0	-	40	40.000.000	40	40.000.000	40	80.000.000	Cabang Dinas KP Natuna
										0	-	1000	40.000.000	1000	40.000.000	1000	80.000.000	Cabang Dinas KP Lingga
										0	-	40	40.000.000	40	40.000.000	40	80.000.000	Cabang Dinas KP Karimun
										0	-	40	40.000.000	40	40.000.000	40	80.000.000	Cabang Dinas KP Batam
		3	25	03	1.05	04	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang ditetapkan	Dokumen	0	-	1	202.512.617	1	200.000.000	1	402.512.617	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
		3	25	3	1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah pelayanan terhadap kapal perikanan	Layanan	300	9.885.019.602	300	2.400.000.000	300	2.625.000.000	300	14.910.019.602	
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Unit	3		3		4		4		
		3	25	3	1.06	01	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Pelabuhan Perikanan	0	-	1	150.000.000	1	200.000.000	1	350.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
		3	25	3	1.06	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Unit	3	9.788.143.067	2	1.000.000.000	3	1.000.000.000	3	11.788.143.067	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
										0	-	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	2.000.000.000	UPTD BPP Antang
		3	25	3	1.06	03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Layanan	0	-	2	150.000.000	2	250.000.000	2	400.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri

Tujuan	Sasaran	Kode					Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
										2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
										2	96.876.535	3	100.000.000	3	175.000.000	3	371.876.535	UPTD BPP Antang
		3	25	3	1.07		Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Izin Pengadaan Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT yang diterbitkan	Rekomendasi	0	-	125	150.000.000	150	150.000.000	0	300.000.000	
		3	25	3	1.07	02	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapa Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan	Rekomendasi	0	-	0	-	0	-	0	-	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
		3	25	3	1.07	03	Penerbitan surat rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan	Rekomendasi			125	150.000.000	150	150.000.000	150	300.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
		3	25	3	1.08		Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan	Rekomendasi	0	-	125	50.000.000	150	80.000.000	0	130.000.000	
		3	25	3	1.08	02	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Rekomendasi	0	-	0	-	0	-	0	-	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
										0	-	0	-	0	-	0	-	Cabang Dinas KP Natuna
										0	-	0	-	0	-	0	-	Cabang Dinas KP Karimun
										0	-	0	-	0	-	0	-	Cabang Dinas KP Batam
		3	25	3	1.08	03	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Rekomendasi			125	50.000.000	150	80.000.000	150	130.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
		3	25	03	1.09		Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah kapal perikanan diatas 10 GT sampai dengan 30 GT yang terdaftar	Rekomendasi	0	-	125	100.000.000	150	100.000.000	0	200.000.000	-
		3	25	3	1.09	02	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Rekomendasi	0	-	0	-	0	-	0	-	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
		3	25	3	1.09	03	Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Rekomendasi			125	100.000.000,00	150	100.000.000,00	150	200.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
		3	25	03	1.10		Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Pendaftaran Kapal yang diterbitkan	Rekomendasi	140	385.047.072	125	50.000.000	150	80.000.000	0	515.047.072	
		3	25	3	1.10	02	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Rekomendasi	0	-	0	-	0	-	0	-	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
										0	-	0	-	0	-	0	-	Cabang Dinas KP Anambas
										0	-	0	-	0	-	0	-	Cabang Dinas KP Natuna

Tujuan	Sasaran	Kode					Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
										2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
										0	-	0	-	0	-	0	-	Cabang Dinas KP Lingga
										70	225.179.616	0	-	0	-	0	225.179.616	Cabang Dinas KP Karimun
										70	159.867.456	0	-	0	-	0	159.867.456	Cabang Dinas KP Batam
		3	25	3	1.10	03	Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Rekomendasi			125	50.000.000	150	80.000.000	150	130.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
		3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAM BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	30.614,37	6.552.228.919	32.955,78	16.284.889.169	35.288,63	17.504.778.162	35.288,63	40.341.896.250	
								Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	Indeks (%)	111,20		111,76		112,32		112,32		
		3	25	04	1.01		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah rekomendasi izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan	Rekomendasi	0	-	0	-	0	-	30	-	
		3	25	04	1.01	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	Rekomendasi	0	-	0	-	0	-	0	-	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
		3	25	04	1.01	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	Rekomendasi	0	-	0	-	0	-	0	-	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
		3	25	04	1.03		Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah rekomendasi izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang diterbitkan	Rekomendasi	0	-	3	20.000.000	3	20.000.000	36	40.000.000	
		3	25	4	1.03	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan yang menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan	Rekomendasi	0	-	1	10.000.000	1	10.000.000	1	20.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
		3	25	04	1.03	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan yang menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan	Rekomendasi	0	-	3	10.000.000	3	10.000.000	3	20.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
		3	25	04	1.04		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut yang diterbitkan	Rekomendasi	0	-	450	250.000.000,00	450	250.000.000,00	450	500.000.000,00	
		3	25	4	1.04	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudi Daya Ikan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rekomendasi	0	-	0	-	0	-	1	-	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
		3	25	4	1.04	02	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rekomendasi	0	-	200	150.000.000	200	150.000.000	200	300.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
										0	-	50	20.000.000	50	20.000.000	50	40.000.000	Cabang Dinas KP Anambas
										0	-	50	20.000.000	50	20.000.000	50	40.000.000	Cabang Dinas KP Natuna

Tujuan	Sasaran	Kode					Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
										2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
										0	-	50	20.000.000	50	20.000.000	50	40.000.000	Cabang Dinas KP Lingga
										0	-	50	20.000.000	50	20.000.000	50	40.000.000	Cabang Dinas KP Karimun
										0	-	50	20.000.000	50	20.000.000	50	40.000.000	Cabang Dinas KP Batam
		3	25	04	1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Pembudidaya yang terfasilitasi sarana prasarana Perikanan Budidaya	Orang	948	6.552.228.919	1190	15.714.889.169	1210	16.934.778.162	1210	39.201.896.250		
							Jumlah Luasan pemanfaatan lahan perikanan budidaya	Ha	30		30		30		30			
							Jumlah Bantuan Sarana dan Prasarana Perbenihan, Pembesaran dan unit usaha baru perikanan budidaya yang tersedia	Unit	948		1190		1190		1190			
							Jumlah ketersediaan benih bermutu di UPTD BBI	ekor	300/100 ribu		400/130 ribu		400/160 ribu		400		BBI	
							Jumlah ketersediaan induk unggul di UPTD BBI	ekor	100		7		100					
		3	25	04	1.05	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan	Dokumen	1	6.743.297	1	100.000.000	1	100.000.000	4	206.743.297	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
		3	25	04	1.05	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit	418	2.307.024.320	670	4.514.889.169,00	690	5.034.778.162	690	11.856.691.651	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
										15	930.159.500	10	2.500.000.000	10	2.700.000.000,00	10	6.130.159.500	UPTD BBI
		3	25	04	1.05	04	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit	10	1.962.480.925	520	5.300.000.000,00	520	5.800.000.000,00	520	13.062.480.925	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
										1	116.540.300,00	15	700.000.000	15	700.000.000	15	1.516.540.300	UPTD BBI
		3	25	04	1.05	06	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat	Dokumen	1	276.128.384	0	-	0	-	1	276.128.384	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
										0	-	0	-	0	-	1	-	UPTD BBI
		3	25	04	1.05	07	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	Orang	0	-	600	400.000.000	600	400.000.000	600	800.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
		3	25	04	1.05	08	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Ditetapkan untuk dikembangkan, Dimanfaatkan, dan Dilindungi	Ha	30	953.152.193	0	-	0	-	0	953.152.193	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
		3	25	04	1.05	12	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	Dokumen			3	700.000.000	3	700.000.000	3	1.400.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
		3	25	04	1.05	13	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen			5	800.000.000	5	800.000.000	5	1.600.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
												1	700.000.000	1	700.000.000	1	1.400.000.000	UPTD BBI
		3	25	04	1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah sarana dan prasarana budidaya perikanan darat yang disediakan	Unit	0	-	30	300.000.000	30	300.000.000	30	600.000.000	-	
		3	25	04	1.06	03	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit	0	-	15	150.000.000	15	150.000.000	15	300.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri

Tujuan	Sasaran	Kode					Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
										2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		3	25	04	1.06	04	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit	0	-	15	150.000.000	15	150.000.000	15	300.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
	Mengoptimalkan Pengelolaan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kasus IUU Fishing / konflik pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang diselesaikan	%	90	1.646.021.862	90	6.353.194.741	90	7.028.976.399	90	15.028.193.002	
		3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah laporan hasil pengawan pelaku usaha yang diawasi kepatuhannya	Dokumen	3	1.646.021.862	3	6.353.194.741	3	7.028.976.399	3	15.028.193.002	
		3	25	05	1.01	01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Dokumen	1	1.005.739.708	0	-	0	-	1	1.005.739.708	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
										1	82.936.368	0	-	0	-	1	82.936.368	Cabang Dinas KP Anambas
										0	-	0	-	0	-	0	-	Cabang Dinas KP Natuna
										0	-	0	-	0	-	0	-	Cabang Dinas KP Lingga
										1	217.709.312	0	-	0	-	1	217.709.312	Cabang Dinas KP Karimun
										1	182.534.916	0	-	0	-	1	182.534.916	Cabang Dinas KP Batam
		3	25	05	1.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Dokumen	0	-	0	-	0	-	0	-	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
										0	-	0	-	0	-	0	-	Cabang Dinas KP Anambas
										0	-	0	-	0	-	0	-	Cabang Dinas KP Natuna
										1	36.812.780	0	-	0	-	1	36.812.780	Cabang Dinas KP Lingga
										0	-	0	-	0	-	0	-	Cabang Dinas KP Karimun
										1	17.010.000	0	-	0	-	1	17.010.000	Cabang Dinas KP Batam
			25	5	1.01	03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Budidaya Ikan di Laut 12 Mil	Dokumen	0	-	0	-	0	-	0	-	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
										0	-	0	-	0	-	0	-	Cabang Dinas KP Anambas
										0	-	0	-	0	-	0	-	Cabang Dinas KP Natuna
										0	-	0	-	0	-	0	-	Cabang Dinas KP Lingga
										0	-	0	-	0	-	0	-	Cabang Dinas KP Karimun
										0	-	0	-	0	-	0	-	Cabang Dinas KP Batam
		3	25	05	1.01	04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas	Kelompok	0	-	0	-	0	-	0	-	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
										2	17.397.400	0	-	0	-	2	17.397.400	Cabang Dinas KP Anambas
										0	-	0	-	0	-	0	-	Cabang Dinas KP Natuna
										0	-	0	-	0	-	0	-	Cabang Dinas KP Lingga

Tujuan	Sasaran	Kode					Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
										2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
										0	-	0	-	0	-	0	-	Cabang Dinas KP Karimun
										10	85.881.378	0	-	0	-	10	85.881.378	Cabang Dinas KP Batam
		3	25	05	1.01	10	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Hari Operasi			60	1.000.000.000	60	1.000.000.000	60	2.000.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
		3	25	05	1.01	14	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha			30	2.408.194.741	30	2.550.994.308	30	4.959.189.049	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
												6	40.000.000	6	75.000.000	6	115.000.000	Cabang Dinas KP Anambas
												6	40.000.000	6	75.000.000	6	115.000.000	Cabang Dinas KP Natuna
												6	40.000.000	6	75.000.000	6	115.000.000	Cabang Dinas KP Lingga
												6	40.000.000	6	75.000.000	6	115.000.000	Cabang Dinas KP Karimun
												6	40.000.000	6	75.000.000	6	115.000.000	Cabang Dinas KP Batam
		3	25	05	1.01	16	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha			8	1.000.000.000	8	1.027.982.091	8	2.027.982.091	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
												1	125.000.000	1	150.000.000	2	275.000.000	Cabang Dinas KP Anambas
												1	180.000.000	1	250.000.000	2	430.000.000	Cabang Dinas KP Natuna
												1	180.000.000	1	220.000.000	2	400.000.000	Cabang Dinas KP Lingga
												2	180.000.000	2	250.000.000	4	430.000.000	Cabang Dinas KP Karimun
												2	180.000.000	2	250.000.000	4	430.000.000	Cabang Dinas KP Batam
		3	25	05	1.01	17	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	Kelompok Masyarakat			48	500.000.000	48	500.000.000	48	1.000.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
												3	35.000.000	4	50.000.000	4	85.000.000	Cabang Dinas KP Anambas
												13	100.000.000	13	100.000.000	13	200.000.000	Cabang Dinas KP Natuna
												4	50.000.000	6	75.000.000	6	125.000.000	Cabang Dinas KP Lingga
												14	100.000.000	14	100.000.000	14	200.000.000	Cabang Dinas KP Karimun
										11	115.000.000	12	130.000.000	12	245.000.000	Cabang Dinas KP Batam		

Tujuan	Sasaran	Kode				Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	
									2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Meningkatkan daya saing dan pemasaran produk hasil perikanan	3	25	06		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan	Ton	13200	1.162.345.748	13400	3.578.387.429	13500	4.756.624.684	13500	9.497.357.861		
							Angka Konsumsi Ikan (AKI)	kg/kap/tahun	65,17		65,36		65,62		65,62			
							Nilai Ekspor Olahan hasil Perikanan	USD	31.817.850		31.824.214		31.830.578		31.830.578			
		3	25	06	1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang mendapatkan Surat Keterangan Berusaha	Unit Pengolah Ikan	0	-	25	400.000.000	30	525.000.000	58	925.000.000		
							Jumlah rekomendasi GMP yang diterbitkan bagi Unit Pegolah Ikan	Rekomendasi			65		75		75			
		3	25	06	1.01	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rekomendasi	0	-	0	-	0	-	0	-	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
		3	25	06	1.01	03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Dokumen	0	-	0	-	0	-	0	-	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
		3	25	06	1.01	04	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	Dokumen			1	30.000.000	1	50.000.000	2	80.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
		3	25	06	1.01	07	Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar	Rekomendasi			65	370.000.000	75	475.000.000	75	845.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
		3	25	06	1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar	Event/kegiatan	2	616.598.568	2	1.355.000.000	2	1.475.000.000	5	3.446.598.568	
							Jumlah unit usaha pengolahan ikan (UPI) yang diuji kelayakan mutu produk	Unit Usaha	55		65		75		75			
		3	25	06	1.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	4	44.192.040	0	-	0	-	4	44.192.040	UPTD BPMP2KP
		3	25	06	1.02	02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Unit Usaha	5	491.870.728	0	-	0	-	5	491.870.728	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
								55	80.535.800	0	-	0	-	55	80.535.800	UPTD BPMP2KP		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
										2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		3	25	06	1.02	03	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Kegiatan			2	625.000.000,00	2	625.000.000,00	4	1.250.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
												2	100.000.000	2	100.000.000	4	200.000.000	UPTD BPMP2KP
		3	25	06	1.02	04	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitas, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	Kegiatan			4	630.000.000	4	750.000.000	8	1.380.000.000	UPTD BPMP2KP
		3	25	06	1.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah kelompok/pelaku usaha yang memperoleh bahan baku industri pengolahan ikan	Kelompok	5	545.747.180,00	10	1.823.387.429	15	2.756.624.684	20	5.125.759.293	
		3	25	06	1.03	01	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi ikan Lintas Daerah Kabupaten /Kota dalam 1	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan /Distribusi ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen	0	-	0	-	0	-	0	-	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
		3	25	06	1.03	02	Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitas	Unit Usaha	2	545.747.180,00	4	1.823.387.429	4	2.756.624.684,00	4	5.125.759.293	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
		JUMLAH									73.296.413.023,00		100.795.495.721		103.836.130.126		277.928.038.870	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari program/kegiatan/subkegiatan sehubungan dengan penggunaan dan pemanfaatan sumber daya pembangunan. Ukuran keberhasilan pembangunan atau umumnya disebut dengan kinerja suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Lebih lanjut, indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu tujuan/sasaran, program, dan kegiatan.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dalam mendukung tercapainya visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 yang telah ditertampung dalam dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.

Indikator kinerja tersebut diatas merupakan indikator kinerja yang dapat digunakan sebagai bahan acuan evaluasi dari rencana program telah dilaksanakan. Tabel 7.1 dan Tabel 7.2 merupakan indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau menurut program-program yang direncanakan beserta target capaiannya tiap tahunnya.

TABEL 7.1.
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN PERUBAHAN RPJMD
TAHUN 2024-2026

TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	2024	2025	2026	KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD
Optimalisasi Kualitas Perekonomian Sektor Perikanan	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB harga berlaku	Miliar Rp	3.313	3.322	3.330	3.330
	Nilai Tukar Nelayan/NTN	Nilai	116	116,1	116,3	116,3
Meningkatkan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap serta meningkatkan kapasitas nelayan terkait teknologi kelautan perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	308.305,60	308.921,60	309.538,60	309.538,60
	Nilai Nelayan/Tukar NTN	Nilai	116,00	116,10	116,30	116,30
	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	30.614,37	32.955,78	35.288,63	35.288,63
	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan/NTPi	Nilai	111,20	111,76	112,32	112,32
Mengoptimalkan Pengelolaan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Kawasan Konservasi yang dikelola minimum sesuai regulasi (sesuai Perdirjen PRL NOMOR 281 KEP-DJPRL I 2020)	Kawasan	4	4	4	4
	Persentase kasus IUU Fishing/konflik pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang diselesaikan	Nilai	90,00	90,00	90,00	90,00
Meningkatkan daya saing dan pemasaran produk hasil perikanan	Jumlah Produk olahan hasil perikanan	Ton	13.200	13.400	13.500	13.500
	Angka Konsumsi Ikan (AKI)	Kg/Kapita	64,98	65,17	65,36	65,62
Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Akuntabilitas Kinerja	Nilai Sakip	BB	BB	BB	BB
Meningkatkan kualitas pengawasan, perencanaan, pengelolaan, dan keuangan pembangunan yang terpadu dan akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip	BB	BB	BB	BB
	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	100	100	100

TABEL 7.2.
INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN PERUBAHAN RPJMD
TAHUN 2024-2026

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	2024	2025	2026	KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) provinsi (sumber data: one data KKP)	Ton	338.920	341.877	344.827	344.827
2	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	%	100	100	100	100

8.1. KESIMPULAN

Rencana kerja pembangunan kelautan dan perikanan yang tertuang dalam Perubahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja, implementasi penguatan peran para *stakeholders* dalam pelaksanaan Rencana Kerja. Disamping itu Renstra menjadi dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau. Perubahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026 ini juga memberikan landasan kebijakan operasional bagi Sekretariat, seluruh Bidang, Cabang Dinas dan UPT lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, baik di jajaran struktural maupun fungsional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Renstra ini menjadi arah pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang kelautan dan perikanan, khususnya peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka menjawab isu strategis pengurangan kemiskinan, pengurangan pengangguran, pembangunan infrastruktur dan tata kelola pemerintahan

8.2. KAIDAH PELAKSANAAN

Perubahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 disusun melalui berbagai tahapan yakni persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan diakhiri dengan penetapan setelah Perubahan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD. Rancangan akhir Perubahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau telah diverifikasi oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka penyelarasan akhir dengan Perubahan RPJMD dan telah diajukan kepada Kepala Daerah guna memperoleh penetapan. Yang selanjutnya menjadi bagi pedoman Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dalam menyusun rancangan Rencana Kerja (Renja) setiap tahun.

Atas dasar itulah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Perubahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

1. Perubahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau akan diimplementasikan dengan konsisten dengan mematuhi asas-asas pemerintahan umum yang berlaku.
2. Pelaksanaan Perubahan Renstra ini merupakan tanggung jawab penuh dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, dimana bersama dengan Kepala Barenlitbang, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra ini.
3. Evaluasi pencapaian sasaran Perubahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dilakukan sekurangkurangnya sekali dalam lima tahun.

4. Pelaksanaan Perubahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dilakukan melalui Renja Dinas setiap tahun dan realisasinya melalui DPA Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau setiap tahun.
5. Pengendalian dan evaluasi hasil Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau tiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA per triwulan merupakan bagian integral dari pengendalian dan evaluasi hasil RKPD dan digunakan juga untuk menyusun LAKIP sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Perubahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dalam mencapai sasaran Renstra.
6. Dalam pelaksanaannya, Perubahan Renstra ini harus mampu mendorong keterlibatan *stakeholder* pembangunan.

Tanjungpinang, Januari 2024

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



DR. SAID SUDRAJAD, S.Sos., M.Si

NIP. 19690504 200003 1 008